



**PENGADILAN NEGERI, HUBUNGAN INDUSTRIAL  
DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA KELAS IA**  
JALAN KAPAS NO 10 YOGYAKARTA TELP (0274) 586563

# LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2019

**YOGYAKARTA, 2020**



<http://pn-yogyakarta.go.id/>



PN Yogya



@pnjogja

**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2019  
PENGADILAN NEGERI, HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN TINDAK PIDANA KORUPSI  
YOGYAKARTA KELAS IA**



**TAHUN  
2019**

**JL. KAPAS 10 YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan karunianya sehingga kami dapat menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta kelas IA Tahun 2019.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta kelas IA ini adalah penyampaian hasil pertanggung jawaban mengenai program kegiatan dan pelaksanaan kinerja selama Tahun Anggaran 2019.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini kami susun berdasarkan surat dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku I pada Bagian ketiga (Prosedur Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan), Surat dari Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 1730/SEK/OT.01.2/I2/2019 Tanggal 16 Desember 2019.

Pelaksanaan kegiatan dan program kerja serta inovasi pelayanan publik yang telah dilaksanakan selama tahun 2019 akan kami laporkan pada masing-masing bagian. Mulai dari Kebijakan Umum Peradilan, Visi dan Misi serta Rencana Strategis (Renstra), Keadaan Penyelesaian Perkara, Sumber Daya Manusia, Pengelolaan Keuangan, Sarana Prasarana dan Teknologi Informasi, Peningkatan Pelayanan Publik dan Pengawasan.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah membantu untuk menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini. Laporan Pelaksanaan Kegiatan yang disusun ini disadari jauh dari kesempurnaan dan masih terdapat banyak kekurangan baik menyangkut materi maupun penyajiannya, oleh karena itu kami mengharapkan koreksi dan saran-saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan kinerja dan laporan yang akan datang. Semoga dengan tersusunnya Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini akan menjadi pedoman untuk perbaikan kinerja pada Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta kelas IA.

Pengadilan Negeri Yogyakarta,  
Ketua

BUDI PRASETYO, SH.,MH  
NIP. 196010031992121001

## DAFTAR ISI

PENGANTAR .....	2
DAFTAR ISI .....	3
Bab I      Pendahuluan.....	5
Bab II     A. Keadaan Perkara di Pengadilan Negeri Yogyakarta .....	
- Keadaan Perkara Tingkat Pertama .....	
- Keadaan Perkara Tingkat Banding .....	
- Keadaan Perkara Tingkat Kasasi .....	
- Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali .....	
B. Penyelesaian Perkara .....	
- Jumlah sisa perkara yang diputus .....	
- Jumlah perkara yang diputus tepat waktu .....	
- Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK .....	
- Jumlah perkara perdata yang berhasil dimediasi .....	
- Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi .....	
C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan) .....	
- Posbakum.....	38
- Perkara Prodeo (pembebasan biaya perkara).....	42
- Sidang Keliling.....	43
Bab III    Sumber Daya Manusia .....	44
Komposisi SDM berdasarkan kepangkatan / golongan / pendidikan	
1. Mutasi.....	47
2. Promosi.....	47
3. Pensiun.....	48
4. Diklat (SDM Teknis/non Teknis yang telah mengikuti Diklat... ..	48
Bab IV    Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasarana, dan Teknologi Informasi.60	
A. Pengelolaan Keuangan .....	
- Pengelolaan Keuangan DIPA.....	
- Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)... ..	68
- Pengelolaan Keuangan Perkara.....	72
B. Pengelolaan Saran Prasarana .....	
C. Pengelolaan Teknologi Informasi .....	
- Implementasi e-court di Lingkungan Peradilan Negeri Yogyakarta.....	
- Implementasi SIPP di lingkungan Peradilan Negeri Yogyakarta .....	
Bab V.     Peningkatan Pelayanan Publik .....	
- Akreditasi Penjaminan Mutu .....	

	- Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) .....	
	- Inovasi Pelayanan Publik.....	
	- Reformasi Birokrasi.....	36
	- Zona Integritas.....	37
	- Evaluasi Pelayanan Publik.....	38
	- Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).....	38
BAB VI	Pengawasan.....	115
	A. Internal.....	115
	B. Evaluasi .....	115
BAB VII	Penutup.....	117
	A. Kesimpulan .....	117
	B. Saran.....	117

## BAB I PENDAHULUAN

### A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN

Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta kelas IA adalah instansi vertikal dari Mahkamah Agung yang bertugas menerima, memeriksa, mengadili serta memutus suatu perkara yang diajukan oleh masyarakat pencari keadilan.

Sesuai dengan Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035 diperlukan adanya usaha dan kerja keras untuk mewujudkan sebuah Badan Peradilan yang Agung dengan:

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif dan berkeadilan.
2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.
3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.
5. Mengelola sarana dan prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman dan kondusif bagi penyelenggara peradilan.
6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.
7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi dan jalannya peradilan.
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima
9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.
10. Modern dengan berbasis Teknologi Informasi terpadu

Selain hal diatas sesuai dengan arah dan kebijakan Mahkamah Agung RI dengan Agenda Pembaruannya, maka di Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA mempunyai program prioritas yang harus dilaksanakan, antara lain :

#### 1. Program Keterbukaan Informasi di Pengadilan

Dengan adanya SK KMA I-I/144/2011 tentang Keterbukaan Informasi Publik maka pada Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta kelas IA juga telah membuat website Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta dengan alamat : [www.pn.yogyakota.go.id](http://www.pn.yogyakota.go.id).

Program Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan telah dapat memberikan kemudahan mendapatkan informasi kepada masyarakat pencari keadilan, baik pada website maupun administrasi di pengadilan.

Untuk mempermudah dan mempercepat proses pelayanan, Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta kelas IA telah mengimplementasikan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dimana telah diimplementasikan aplikasi PTSP dari Dirjen Badilum, E-SKum dan KIOS-K untuk informasi perkara dan antrian sidang, jadwal sidang, antrian PTSP, aplikasi IKM dan media informasi lainnya.

Sedangkan untuk ruang sidang Pengadilan Negeri dan Tipikor telah dipasang ATR dan alat perekam audio visual untuk membatu proses persidangan.

## **2. Program Pengembangan Sistem Pengadilan yang Akuntabel dan Transparan.**

Program pengembangan system peradilan yang akuntabel dan transparan tercermin dengan Pimpinan telah terlibat secara langsung pada saat penyusunan RENSTRA, Penetapan Kinerja, IKU, Pemantauan Pencapaian kinerja, LKJIP, Penyusunan SAKIP. Pengelolaan Akuntabilitas kinerja tercermin:

1. Upaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani Akuntabilitas Kinerja;
2. Tersusunnya Pedoman Akuntabilitas Kinerja ;
3. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara berkala;

Pelaporan melalui SIPP, Direktori Putusan, SIKEP MARI, SIMARI, Komdanas, e-LLK, Aplikasi SAS,SILABI, Monitor Jadwal Sidang dan lain-lain.

## **3. Program Rencana Strategis dan Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung RI**

Dengan telah diterbitkannya Cetak Biru Mahkamah Agung 2010 - 2035, Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta kelas IA berusaha mengadakan perbaikan dan perubahan seperti apa yang tertuang dalam Cetak Biru tersebut. Rencana strategis telah direview dan berakhir di tahun 2019 ini.

## **4. Modernisasi layanan peradilan berbasis teknologi informasi dan Program Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)**

Dalam sistem peradilan modern, penegakan hukum mau tidak mau, suka atau tidak suka harus merespons perkembangan teknologi informasi. Karena sebagai fenomena perubahan paradigma, dimana pun negara-negara di dunia, khususnya negara hukum modern (yang sudah maju maupun berkembang) sistem peradilan nya secara langsung atau tidak langsung merespons terjadinya sebuah interaksi sosial (masyarakat pencari keadilan) dengan penegakan hukum yang lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan keadaan sebelumnya.

Penggunaan teknologi informasi dalam sistem peradilan modern sesungguhnya merupakan salah satu ciri peradilan yang excellent, yaitu manajemen dan kepemimpinan peradilan sebagai “driver” lembaga peradilan, sehingga akan memudahkan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang berkenaan dengan sumber daya manusia, sumber daya material, sumber daya finansial, dan proses peradilannya. Harapan hasil dari peradilan yang excellent adalah dipenuhinya kebutuhan dan kepuasan para pencari keadilan dalam berproses di pengadilan, keterjangkauan dan mudah diaksesnya informasi perkara, dan adanya keterbukaan yang menimbulkan kepercayaan publik akan lembaga peradilan tersebut.

Pada Program PTSP Pengadilan Negeri Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Kelas IA Yogyakarta telah melaksanakan Pelayanan dalam satu meja pelayanan untuk pelayanan perkara perdata, pidana dan kepaniteraaran hukum serta pelayanan surat masuk dalam satu meja pelayanan. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan salah satu program pengadilan dalam rangka peningkatan pelayanan public, memangkas birokrasi pelayanan dan sebagai upaya mencapai good governance/kepemerintahan yang baik .

#### **5. Penguatan anti korupsi melalui pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).**

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta menginstruksikan kepada jajarannya untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi. Salah satu strateginya adalah “Strategi Pencegahan”.

Berbagai upaya pencegahan sebenarnya telah dilakukan, antara lain dengan meningkatkan mutu layanan, seperti yang dicontohkan melalui pembentukan *pelayanan terpadu satu pintu* (PTSP). Namun, dalam implementasinya, persepsi masyarakat masih mencerminkan adanya kelemahan, terutama menyangkut penyelesaian perkara yang meninggalkan sekian celah bagi korupsi.

#### **6. Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)**

Implementasi SNI ISO 37001 : 2016 telah dilakukan secara bertahap yang dimulai dengan penetapan Inpres No.10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, yang diikuti dengan adopsi ISO 37001 : 2016 menjadi SNI ISO 37001 : 2016 melalui Keputusan Kepala Badan Standarisasi Nasional

No.248/KEP/BSN/11/2016 pada bulan November 2016. SNI ISO 37001 dirancang bagi organisasi untuk menaati peraturan perundang-undangan serta memiliki kemampuan untuk mencegah (*prevent*), mendeteksi (*detect*), dan menangani (*respond*) terjadinya tindak pidana suap dengan berdasar pada 6 prinsip yaitu prosedur yang proporsional, komitmen pimpinan, manajemen risiko, uji kelayakan (*due diligence*), komunikasi yang efektif, serta monitoring dan review/evaluasi. Penerapan keenam prinsip tersebut dilakukan dalam sebuah proses yang disebut PDCA yaitu *Plan, Do, Check, dan Act*. SMAP berdasarkan pada 44 klausul yang menjadi kriteria SMAP yang mana dalam penerapannya di Pengadilan Negeri hanya dilakukan pada 43 klausul karena 1 klausul yaitu adanya organ lain di bawah Pengadilan Negeri tidak diterapkan dalam penilaian.

Pada tahapan penerapan SNI ISO 37001 dilakukan persiapan yang meliputi training dan gap analysis, pengembangan sistem yang meliputi pengembangan kebijakan dan pengembangan dokumentasi, implementasi yang meliputi sosialisasi dan implementasi sistem, review sistem yang meliputi audit internal, tinjauan manajemen, dan persiapan sertifikasi, serta Sertifikasi yang meliputi pemilihan lembaga sertifikasi, pelaksanaan audit, perbaikan hasil audit, dan keputusan sertifikasi. Pengadilan negeri yang diajukan sebagai *pilot project* saat itu diminta untuk melakukan *bribery assement* terhadap titik-titik rawan suap serta membuat program kerja untuk mengawasi titik-titik rawan suap tersebut. Dalam penerapannya, sistem yang telah ada dalam rangka melakukan pencegahan, pendeteksian, dan penindakan atas perilaku suap disinergikan dalam rangka pengendalian suap dan gratifikasi serta penanganan atas pelanggaran yang terjadi. Terhadap sistem yang telah terbangun dan mendapatkan akreditasi maka akan dilakukan *surveillance* pada setiap 1 tahun dan jika ditemukan pelanggaran maka sertifikat SNI ISO 37001 : 2016 bisa dicabut.

Adapun dasar dari pembuatan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Kelas IA Yogyakarta yaitu Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang memberlakukan Buku I pada Bagian Ketiga ( Prosedur Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan) serta Surat dari Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 1730/SEK/OT.01.2/I/2/2019 Tanggal 16 Desember 2019 perihal Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019.

Tujuan Pembuatan Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini yaitu untuk mengevaluasi semua kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2019 dan juga sebagai barometer untuk peningkatan kinerja pada tahun yang akan datang. Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini berisi tentang kegiatan-kegiatan di bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan

## **B. VISI dan MISI**

1. Visi Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta kelas IA sesuai dengan Visi Mahkamah Agung RI :  
“Terwujudnya Pengadilan Negeri Yogyakarta Yang Agung”
2. Misi Pengadilan Negeri Yogyakarta juga sesuai dengan Misi Mahkamah Agung RI yaitu :
  - a. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta kelas IA.
  - b. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan
  - c. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta kelas IA.
  - d. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta kelas IA

## **C RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**

Untuk mewujudkan visi dan misi diatas perlu adanya suatu perencanaan strategis di Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta kelas IA yang terfokus pada pelaksanaan peradilan tingkat pertama secara efektif, sesuai tuntutan perkembangan jaman, kualitas hukum dan masyarakat pencari keadilan yang semakin hari semakin kompleks, dan semakin tinggi kualitasnya. Sehingga terbentuk suatu manajemen peradilan yang baik, dengan memperhitungkan tujuan, sasaran atau variabel yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan yaitu :

1. Terciptanya fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif dan berkeadilan.
2. Terciptanya pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proposional dalam APBN.
3. Terciptanya struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
4. Terciptanya manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proposional.
5. Tersedianya / terpenuhi sarana dan prasarana guna menunjang pelaksanaan tugas operasional terhadap sistem pelayanan publik yang adil, transparan dan akuntabel.

Adapun Rencana Program dan Kegiatan yang ada pada tahun 2019 adalah:

- a. Program dari lembaga Mahkamah Agung RI yang tertuang dalam DIPA adalah:
  1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, dalam program ini, Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta kelas IA yang merupakan lembaga peradilan pada tingkat pertama, selalu berupaya untuk memperkuat kepercayaan masyarakat kepada lembaga

penegak hukum dalam rangka mempercepat pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap hukum pada umumnya dan kepada institusi lainnya beserta infrastruktur yang ada, sehingga diharapkan terwujudnya lembaga penegak hukum yang transparan, akuntabel dan berkualitas, sehingga pelayanan prima dalam penegakan hukum dapat segera dirasakan oleh masyarakat.

## 2. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Pada Program ini di Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta kelas IA tersedia anggaran untuk perkara operasional persidangan PHI, Pengamanan Persidangan dan Pemberian Konsumsi bagi Terdakwa, pembebasan biaya Perkara dan adanya pelayanan Pos Bantuan Hukum khususnya bagi masyarakat yang tidak mampu.

## 3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Mahkamah Agung

Pada Program ini pada Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial, Tindak Pidana Korupsi Kelas IA Yogyakarta tersedia anggaran untuk pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi, Peralatan dan Fasilitas Pendukung Perkantoran serta Alat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung SIPP.

## BAB II

### KEADAAN DAN PENYELESAIAN PERKARA

#### A. KEADAAN PERKARA DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

Keadaan perkara Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2. 1 Keadaan Perkara Pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2019:**

No	Pengadilan/Perkara	Sisa Tahun 2018	Masuk Tahun 2019	Jumlah Perkara Tahun 2019	Putus Tahun 2019	Sisa Perkara Tahun 2019
1	Pengadilan Negeri Yogyakarta					
	Pidana Biasa	68	347	415	348	67
	Pidana Singkat	0	0	0	0	0
	Pidana Cepat	0	511	511	511	0
	Lalu lintas	0	310285	310285	310285	0
	Pidana Perikanan	0	0	0	0	0
	Tindak Pidana Korupsi	0	10	10	2	8
	Pidana Anak	0	14	14	8	6
	Perdata Gugatan	69	165	234	179	55
	Perdata Permohonan	12	200	212	200	11
	Gugatan Sederhana	0	12	12	10	2
	Perlawanan ( Derden Verzet)	0	6	6	5	1
	PHI	0	45	45	43	2
	Jumlah	149	311595	311744	311591	153

Keadaan perkara Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2019 yang mengajukan upaya hukum banding adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.2 : Keadaan Perkara Tingkat Banding Tahun 2019**

No	Pengadilan/Perkara	Sisa Tahun 2018	Masuk Tahun 2019	Jumlah Perkara Tahun 2019	Putus Tahun 2019	Sisa Banding Tahun 2019
1	Pengadilan Negeri Yogyakarta					
	Pidana Biasa	4	23	27	20	7
	Pidana Singkat	0	0	0	0	0
	Pidana Cepat	0	0	0	0	0
	Lalu lintas	0	0	0	0	0
	Pidana Perikanan	0	0	0	0	0
	Tindak Pidana Korupsi	0	0	0	0	0
	Pidana Anak	0	0	0	0	0
	Perdata Gugatan	2	16	18	6	12
	Perdata Permohonan	0	0	0	0	0
	Gugatan Sederhana	0	2	2	2	0
	Perlawanan (Derden Verzet)	0	1	1	0	1
	PHI	0	0	0	0	0
	Jumlah	6	40	48	28	20

Keadaan perkara Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2019 yang mengajukan upaya hukum kasasi adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.3 : Keadaan Perkara Tingkat Kasasi Tahun 2019**

No	Pengadilan/Perkara	Sisa Tahun 2018	Masuk Tahun 2019	Jumlah Perkara Tahun 2019	Putus Tahun 2019	Sisa Kasasi Tahun 2019
1	Pengadilan Negeri Yogyakarta					
	Pidana Biasa	4	11	15	1	14
	Pidana Singkat	0	0	0	0	0
	Pidana Cepat	0	0	0	0	0
	Lalu lintas	0	0	0	0	0
	Pidana Perikanan	0	0	0	0	0
	Tindak Pidana Korupsi	0	0	0	0	0
	Pidana Anak	0	0	0	0	0
	Perdata Gugatan	22	1	23	1	22
	Perdata Permohonan	0	0	0	0	0
	Gugatan Sederhana	0	0	0	0	0
	Perlawanan (Derden Verzet)	0	0	0	0	0
	PHI	0	12	12	5	7
	<b>Jumlah</b>	<b>26</b>	<b>24</b>	<b>50</b>	<b>7</b>	<b>43</b>

Keadaan perkara Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2019 yang mengajukan upaya hukum peninjauan kembali adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.4 : Keadaan Perkara Tingkat PK Tahun 2019**

No	Pengadilan/Perkara	Sisa Tahun 2018	Masuk Tahun 2019	Jumlah Perkara Tahun 2019	Putus Tahun 2019	Sisa PK Tahun 2019
1	Pengadilan Negeri Yogyakarta					
	Pidana Biasa	3	0	3	0	3
	Pidana Singkat	0	0	0	0	0
	Pidana Cepat	0	0	0	0	0
	Lalu lintas	0	0	0	0	0
	Pidana Perikanan	0	0	0	0	0
	Tindak Pidana Korupsi	0	0	0	0	0
	Pidana Anak	0	0	0	0	0
	Perdata Gugatan	1	9	10	2	8
	Perdata Permohonan	0	0	0	0	0
	Gugatan Sederhana	0	0	0	0	0
	Perlawanan (Derden Verzet)	0	1	1	0	1
	PHI	0	0	0	0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>2</b>	<b>12</b>

## B. PENYELESAIAN PERKARA

### 1. JUMLAH SISA PERKARA YANG DIPUTUS

Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus adalah jumlah sisa perkara tahun 2018 yang diputus pada tahun 2019

**Tabel 2.5 : Keadaan Sisa Perkara Tahun 2018 Yang Diputus di Tahun 2019**

No	Jenis Perkara	Pengadilan Negeri Yogyakarta		
		Sisa Perkara Tahun 2018	Sisa Perkara Yang Diputus	Sisa Perkara
1	Perdata Gugatan	70	69	1
2	Perdata Permohonan	12	12	0
3	Perdata Konsinyasi	0	0	0
4	Perdata Gugatan Sederhana	0	0	0
5	Perdata Eksekusi	0	0	0
6	Perlawanan/bantahan	0	0	0
7	Pidana Biasa	68	347	67
8	Pidana Singkat	0	0	0
9	Tipikor	0	8	2
10	Pidana Tipiring/Cepat	0	511	0
11	Pidana Lalu-Lintas	0	310285	0
12	Pidana Anak	14	8	6
13	Pidana Praperadilan	1	1	0
Jumlah		165	311233	76

**2. JUMLAH PERKARA YANG DIPUTUS TEPAT WAKTU**

Perkara Yang Diputus Tepat Waktu menurut SEMA No. 2 Tahun 2014 adalah penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan. Adapun jumlah perkara yang diputus tepat waktu tahun 2019 pada Pengadilan Negeri Yogyakarta adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.6 : Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu Tahun 2019**

No	Jenis Perkara	Pengadilan Negeri Yogyakarta		
		Jumlah Putusan	Putusan Tepat Waktu	Putusan terlambat
1	Perdata Gugatan	105	90	15
2	Perdata Permohonan	187	186	1
3	Perdata Konsinyasi	0	0	0
4	Perdata Gugatan Sederhana	10	10	0
5	PHI	43	43	0
6	Perlawanan / Bantahan	6	6	0
7	Pidana Biasa	348	348	0
8	Pidana Singkat	0	0	0
9	Tipikor	2	2	0
10	Pidana Tipiring / Cepat	511	511	0
11	Pidana Lalu-Lintas	310285	310285	0
12	Pidana Anak	8	8	0
13	Pidana Praperadilan	1	1	0
Jumlah		311506	311484	16

### 3. JUMLAH PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM

Berikut adalah jumlah perkara pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang tidak mengajukan upaya hukum pada tahun 2019.

**Tabel 2.7 : Jumlah Perkara Yang Tidak Melakukan Upaya Hukum Tahun 2019**

No	Jenis Perkara	Pengadilan Negeri Yogyakarta		
		Banding	Kasasi	PK
1	Perdata Gugatan	89	104	0
2	Perdata Permohonan	0	0	0
3	Perdata Gugatan Sederhana	2	0	0
4	Pidana Biasa	325	325	325
5	Pidana Singkat	0	0	0
6	Pidana Cepat	511	511	511
7	Pidana Lalu-Lintas	310285	310285	310285
8	Pidana Anak	8	8	8
Jumlah		311220	311233	311129

### 4. JUMLAH PERKARA PERDATA YANG BERHASIL DI MEDIASI

Berikut adalah jumlah perkara perdata pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berhasil di mediasi pada tahun 2019.

**Tabel 2.8 : Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Di Mediasi Tahun 2019**

No	Pengadilan Negeri	Jumlah Perkara Mediasi	Status		
			Berhasil	Tidak Berhasil	Tidak dapat dilaksanakan
1	Pengadilan Negeri Yogyakarta	143	12	101	21
Jumlah		143	12	101	21

### 5. JUMLAH PERKARA ANAK YANG BERHASIL MELALUI DIVERSI

Berikut adalah jumlah perkara anak pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berhasil melalui diversi pada tahun 2019.

**Tabel 2.9 : Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi Tahun 2019**

No	Pengadilan Negeri	Jumlah Perkara Pidana Anak	Jumlah Perkara Diversi	Status		
				Berhasil	Tidak Berhasil	Dalam Proses
1	Pengadilan Negeri Yogyakarta	14	0	0	0	0
Jumlah		14	0	0	0	0

### C. PEMBERIAN LAYANAN HUKUM

**Tabel 2.10 Posbakum (Satker yang mendapat alokasi dan realisasi anggaran)**

NO	Organisasi Pemberi Layanan	Jumlah Layanan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Keterangan
1	AFTA	182	48,000,000	43,605,000	34,500	-
Jumlah		182	48,000,000	43,605,000	34,500	-

Menurut SEMA Nomor:10 Tahun 2010, Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Peradilan Umum diartikan sebagai ruang yang disediakan oleh dan pada setiap Pengadilan Negeri bagi Advokat Piket dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada Pemohon Bantuan Hukum.

Ruang Posbakum digunakan untuk pengisian formulir permohonan bantuan hukum, bantuan pembuatan dokumen hukum, advis atau konsultasi hukum, memberikan rujukan lebih lanjut tentang pembebasan biaya perkara, dan memberikan rujukan lebih lanjut tentang bantuan jasa Advokat. Posbakum diperuntukkan bagi masyarakat yang tidak tahu mengenai masalah hukum dan tidak mampu membayar pengacara untuk menyelesaikan persoalan hukum mereka.

**Kegiatan yang telah dilaksanakan :**

1. Konsultasi
2. Pembuatan Dokumen Hukum
3. Pendampingan persidangan

**Kendala yang dihadapi :**

1. Resiko Penyalahgunaan wewenang (sebagai lapak menjual jasa)
2. Resiko penyuapan
3. Belum adanya system informasi posbakum, administrasi masih manual sehingga pengawasan dan monitoring masih manual

**Langkah antisipasi dan penyelesaian :**

1. Pakta Integritas semua petugas pos bakum
2. Voice Warning System anti penyuapan dan anti gratifikasi
3. Banner / Informasi Mekanisme Pengaduan
4. Monitoring tiap bulan oleh hakim pengawas

### SIDANG KELILING

**Tabel 2.11 Sidang Keliling / Pelayanan Terpadu**

No	Jumlah Kegiatan	Jumlah Perkara	Pagu Anggaran	Jumlah Serapan	Sisa Anggaran	Keterangan
1	6 kali	95 perkara	-	-	-	Sidang Tilang Keliling / Sidang Ditempat

Sidang Keliling adalah sidang yang dilaksanakan secara tetap (berkala) atau sewaktu-waktu oleh pengadilan di suatu tempat yang ada di dalam wilayah hukumnya tetapi di luar tempat kedudukan pengadilan

Sidang keliling ini dimaksudkan untuk memberikan akses terhadap keadilan bagi masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil yang menghadapi masalah ongkos transportasi dari dan ke pengadilan

**Kegiatan yang telah dilaksanakan :**

1. Sidang keliling perkara pidana lalu lintas (tilang)
2. Sidang keliling tindak pidana ringan (tipiring)

**Kendala yang dihadapi :**

- Tidak ada anggaran untuk sidang keliling, anggaran di backup oleh pemda setempat.

**Langkah antisipasi dan penyelesaian :**

- Koordinasi dengan stake holder terkait, agar proses sidang keliling dapat berjalan dengan baik.

**PERKARA PRODEO (PEMBEBASAN BIAYA PERKARA) BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI PENGADILAN**

**Tabel 2.11 Pembebasan Biaya Perkara**

No	Target Perkara	Jumlah Perkara	Pagu Anggaran	Jumlah Serapan	Sisa Anggaran	Keterangan
1	3 Perkara	1 Perkara	2,760,000	320,000	2,440,000	-

Pengadilan Negeri Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA pada tahun anggaran 2019 ini mendapat alokasi anggaran dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum yang tertuang dalam DIPA No.005.03.099128/2019 untuk 3 (tiga) perkara prodeo (pembebasan biaya perkara) Rp. 2,760,000,-. terealisasi 1 (satu) perkara yaitu Rp. 320.000,-, sisa anggaran Rp. 2.440.000,-. hal ini disebabkan tidak adanya masyarakat yang mengajukan perkara baik perkara pidana maupun perdata yang dibiayai oleh pembebasan biaya perkara. Padahal dari Pengadilan Negeri Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA telah melakukan sosialisasi ke masyarakat melalui desa- desa akan tetapi tetap tidak ada perkara yang ditangani melalui prodeo.

**Kegiatan yang telah dilaksanakan :**

Penyelesaian perkara di tingkat pertama baik dari pendaftaran perkara sampai dengan putusan, minutasi, upaya hukum maupun eksekusi.

**Kendala yang dihadapi :**

Pengguna layanan yang mendaftar perkara prodeo sangat sedikit, dikarenakan tingkat ekonomi masyarakat sudah baik

**Langkah antisipasi dan penyelesaian :**

Sosialisasi kepada masyarakat baik melalui media masa maupun website.

## BAB III

### SUMBER DAYA MANUSIA

#### A. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan unsur yang menentukan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan. Dengan beban kerja yang ada dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai baik dari segi jumlah, pendidikan dan kompetensi. Adapun keadaan Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Negeri Yogyakarta adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.1 : Sumber Daya Manusia Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2019**

No	No	Nama	NIP	Jabatan	Pangkat
<b>KETUA, WAKIL KETUA DAN HAKIM</b>					
1	1	BUDI PRASETYO, SH.,MH	19601003 199212 1 001	Ketua	Pembina Utama Muda (IV/c)
2	2	FRIDA ARIYANI, SH.,M.Hum	19680203 199212 2 001	Wakil Ketua	Pembina Utama Muda (IV/c)
3	3	LILIK NURAINI, SH	19620218 198512 2 001	Hakim Utama Muda	Pembina Utama Madya (IV/d)
4	4	SURYANTO, SH	19591010 198612 1 001	Hakim Utama Muda	Pembina Utama Madya (IV/d)
5	5	BANDUNG SUHERMOYO,SH.,M.Hum	19610312 198803 1 002	Hakim Utama Muda	Pembina Utama Madya (IV/d)
6	6	KUN MARYOSO, SH.,MH	19590731 198803 1 002	Hakim Utama Muda	Pembina Utama Madya (IV/d)
7	7	P.COKRO HENDRO MUKTI, SH	19650920 199203 1 004	Hakim Madya Utama	Pembina Utama Muda (IV/c)
8	8	HERIYANTI, SH.,MH	19671206 199212 2 001	Hakim Madya Utama	Pembina Utama Muda (IV/c)
9	9	TITIK BUDI WINARTI, SH.,MH	19600115 199212 2 001	Hakim Madya Utama	Pembina Utama Muda (IV/c)
10	10	IDA RATNAWATI, SH.,MH.	19670612 199212 2 001	Hakim Madya Utama	Pembina Utama Muda (IV/c)
11	11	ASEP PERMANA,SH.,MH	19600131 198503 1 001	Hakim Madya Utama	Pembina Utama Muda (IV/c)
12	12	TAUFIK RAHMAN,SH	19580708 199212 1 001	Hakim Madya Utama	Pembina Utama Muda (IV/c)
13	13	SARI SUDARMI, SH	19650506 199212 2 001	Hakim Madya Utama	Pembina Utama Muda (IV/c)
14	14	SUNDARI, SH.,MH	19640704 199212 2 002	Hakim Madya Utama	Pembina Utama Muda (IV/c)
15	15	RINA ZAIN, SH	19660301 199103 2 001	Hakim Madya Utama	Pembina Utama Muda (IV/c)
16	16	NENDEN RIKA PUSPITASARI,SH.MH	19660724 199403 2 005	Hakim Madya Utama	Pembina Utama Muda (IV/c)
17	17	TRI RACHMAT SETIJANTA, SH.,MH	19651012 198603 1 002	Hakim Madya Utama	Pembina Utama Muda (IV/c)
18	18	NURYANTO, SH.,MH	19671121 199403 1 007	Hakim Madya Utama	Pembina Utama Muda (IV/c)
19	19	SUPARMAN, S.H.,M.H.	19640820 199212 1 001	Hakim Madya Utama	Pembina Utama Muda (IV/c)
20	20	ERNA INDRAWATI, SH.,MH	19620927 199003 2 001	Hakim Madya Utama	Pembina Utama Muda (IV/c)
21	21	NASRULLOH, SH	19690724 199603 1 002	Hakim Madya Muda	Pembina Tk.I (IV/b)
22	22	SRI ARI ASTUTI, SH.,MH	19700414 199603 2 001	Hakim Madya Muda	Pembina Tk.I (IV/b)
23	23	PURNAMA, SH.,MH	19681006 199603 1 001	Hakim Madya Muda	Pembina Tk.I (IV/b)
24	24	TRI RISWANTI, SH.,M.Hum	19710222 199603 2 001	Hakim Madya Muda	Pembina Tk.I (IV/b)

25	25	AGUS NAZARUDDINSYAH, SH	19710228 199203 1 003	Hakim Madya Muda	Pembina Tk.I (IV/b)
26	26	MAHAPUTRA, SH., MH.	19610706 199003 1 007	Hakim Madya Muda	Pembina Tk.I (IV/b)
27	27	A.SURYO HENDRATMOKO, SH	19711112 199903 1 004	Hakim Madya Muda	Pembina Tk.I (IV/b)
28	28	WIYANTO, SH.,MH	19690904 199203 1 005	Hakim Madya Muda	Pembina Tk.I (IV/b)
29	29	AGUS SETIAWAN, SH.,Sp.Not	19740808 200012 1 001	Hakim Madya Pratama	Pembina (IV/a)
<b>STRUKTURAL KEPANITERAAN (TEKNIS)</b>					
30	1	ZULFAHMI ANWAR, SH.,MH	19621231 198312 1 005	Panitera	Pembina Tk.I (IV/b)
31	2	RATMIYATI,SH	19620906 198503 2 002	Panitera Muda Perdata	Penata Tk.I (III/d)
32	3	SATRIYO WIRATMOYO, SH	19630218 198503 1 004	Panitera Muda Pidana	Penata Tk.I (III/d)
33	4	NANIK MULYANI SRI UTAMI, SH	19660405 198502 2 001	Panitera Muda Tipikor	Penata Tk.I (III/d)
34	5	KISWANTANA,SH	19690527 199403 1 002	Panitera Muda PHI	Penata Tk.I (III/d)
35	6	DIAN UMAWATI,SH.MH	19780708 200604 2 001	Panitera Muda Hukum	Penata Tk.I (III/d)
<b>PANITERA PENGGANTI</b>					
36	1	THESIANA MAYA FITRIA A, SH.,MH	19780127 200212 2 003	Panitera Pengganti	Pembina (IV/a)
37	2	RIANDINI,SH	19600725 198803 2 002	Panitera Pengganti	Penata Tk.I (III/d)
38	3	KUS YULIANI,SH	19640801 199203 2 002	Panitera Pengganti	Penata Tk.I (III/d)
39	4	RR.DINAWATI, SH	19671020 199303 2 005	Panitera Pengganti	Penata Tk.I (III/d)
40	5	Rr. SRI WINASTUTI,SH	19690714 199403 2 005	Panitera Pengganti	Penata Tk.I (III/d)
41	6	ANNA HENY W,SH	19660602 199903 2 003	Panitera Pengganti	Penata Tk.I (III/d)
42	7	MARIA LUSIATI,SH	19691115 199203 2 004	Panitera Pengganti	Penata Tk.I (III/d)
43	8	KUWAT WAHYU MURDANA,SH	19690805 199203 1 004	Panitera Pengganti	Penata Tk.I (III/d)
44	9	YANI WIDIYANTI, SH	19700119 199203 2 002	Panitera Pengganti	Penata Tk.I (III/d)
45	10	SRI SUWANTI, SH	19700610 199203 2 002	Panitera Pengganti	Penata Tk.I (III/d)
46	11	YULITA SRI WIDAYATI,SH	19641228 198603 2 002	Panitera Pengganti	Penata Tk.I (III/d)
47	12	NURI MAHAR KESTRI,SH	19750905 200112 2 001	Panitera Pengganti	Penata Tk.I (III/d)
48	13	RATNA DEWANTI,SH	19670226 199303 2 005	Panitera Pengganti	Penata Tk.I (III/d)
49	14	NOORMAN NEFONANTO,SH	19640109 198903 1 003	Panitera Pengganti	Penata Tk.I (III/d)
50	15	NUNUNG DIAH RST, SH	19660409 199003 2 003	Panitera Pengganti	Penata Tk.I (III/d)
51	16	ANTONIUS ANDI SUSANTO, SH	19711110 200604 1 001	Panitera Pengganti	Penata Tk.I (III/d)
52	17	SURYONO NUGROHO,SH	19660518 198803 1 001	Panitera Pengganti	Penata Tk.I (III/d)
53	18	M.V. NANIK SETIASIH	19631210 198503 2 002	Panitera Pengganti	Penata (III/c)
54	19	TUNTUM RAHAYU,SH	19620507 198603 2 005	Panitera Pengganti	Penata (III/c)
55	20	DEWI INDRIYANI, SH	19830427 200805 2 001	Panitera Pengganti	Penata (III/c)
56	21	HERI SANTOSA, SH	19820331 200805 1 001	Panitera Pengganti	Penata (III/c)
57	22	RULLIANA YUDAWATI, SH	19790709 200904 2 004	Panitera Pengganti	Penata (III/c)
58	23	YUDHA AYU TIMORNIYATI, SH	19760615 200604 2 002	Panitera Pengganti	Penata (III/c)
59	24	RR. WORO HAPSARI D,SH	19770607 200012 2 002	Panitera Pengganti	Penata (III/c)
60	25	RIKE SIMBALAGO, SH	19850805 200912 2 005	Panitera Pengganti	Penata (III/c)
61	26	NAFISATUN ANA FITRIA UTAMI, SH	19820706 201101 2 009	Panitera Pengganti	Penata (III/c)
62	27	EKO WAHONO, SH	19800330 200212 1 002	Panitera Pengganti	Penata (III/c)
<b>JURUSITA</b>					
63	1	HERI PRASETYA, SH	19730626 199403 1 003	Juru Sita	Penata Tk I (III/d)
64	2	LUSI RACHMAYANI,SE.SH	19750825 200604 2 003	Juru Sita	Penata Tk.I (III/d)
65	3	HERI CATUR PUDIYANTO	19670414 199303 1 004	Juru Sita	Penata (III/c)
66	4	NANANG SUPRIYADI, SE.,SH.,M.Kn	19730525 200604 1 004	Juru Sita	Penata (III/c)
67	5	ARLYO PERDANA PUTRA,SH	19800707 200805 1 001	Juru Sita	Penata (III/c)
68	6	A. IRIN HINDRIYANI	19611208 198503 2 001	Juru Sita	Penata Muda Tk.I (III/b)

<b>JURUSITA PENGGANTI</b>					
69	1	SRI BAKHRIYATUN K,SE.,SH	19810304 200604 2 003	Jurusita Pengganti / Staf	Penata Tk I (III/d)
70	2	ROSALIA SUNARNI,SmHk	19620905 198702 2 002	Jurusita Pengganti / Staf	Penata (III/c)
71	3	INDRI HARI PURNOMO, SmHk	19630425 199303 1 004	Jurusita Pengganti / Staf	Penata (III/c)
72	4	ENDANG SUSILOWATI	19620708 198903 2 002	Jurusita Pengganti / Staf	Penata (III/c)
73	5	NARSIYO	19641116 198903 1 003	Jurusita Pengganti / Staf	Penata Muda Tk.I (III/b)
74	6	JATMAKA	19630531 199003 1 003	Jurusita Pengganti / Staf	Penata Muda Tk.I (III/b)
75	7	WARSIYATI	19700117 199003 2 001	Jurusita Pengganti / Staf	Penata Muda Tk.I (III/b)
76	8	EDI SETYABUDI	19690305 199103 1 005	Jurusita Pengganti / Staf	Penata Muda Tk.I (III/b)
77	9	DOMINGOS DOUDEL	19760101 199510 1 001	Jurusita Pengganti / Staf	Penata Muda Tk.I (III/b)
78	10	SALASA AGUS EKOYADI.SH	19721004 199303 1 005	Jurusita Pengganti / Staf	Penata Muda Tk.I (III/b)
79	11	MOHAMAD SAID IDUL FITRI, SH	19681221 199003 1 002	Jurusita Pengganti / Staf	Penata Muda (III/a)
<b>STRUKTURAL KESEKRETARIATAN (NON TEKNIS)</b>					
80	1	WIDODO BUDI SANTOSO, SH	19730921 199303 1 004	Sekretaris	Pembina (IV/a)
81	2	SUTARJA,SH	19620106 198503 1 003	Ka.Sub Bag.Umum Dan Keuangan	Penata Tk I (III/d)
82	3	EVENDI NUGROHO,ST	19810330 200604 1 004	Ka.Sub Bag.Kepeg. Ortala	Penata Tk.I (III/d)
83	4	YENNY VIKY EFFENDY,ST.SH.M.Eng	19840410 200904 2 016	Ka.Sub Bab Perencanaan, IT & Pelaporan	Penata (III/c)
<b>STAFF</b>					
84	1	WALJIYANTO,ST.,MM	19800831 200604 1 003	Staf Bag. Umum dan Keuangan	Penata Tk.I (III/d)
85	2	ENY KISDARYANTI,SE.,SH	19791028 200904 2 002	Staf Bag. Umum dan Keuangan	Penata (III/c)
86	3	JEANNE PAMELA,S.Kom,MT	19820922 200904 2 008	Staf Kepaniteraan Perdata	Penata (III/c)
87	4	ARIF BUDI AWAN,SH	19860223 200912 1 003	Staf Kepaniteraan Pidana	Penata (III/c)
88	5	KUNCORO SETYA R,SE.,MM	19860724 201101 1 005	Staf Bag. Umum dan Keuangan	Penata (III/c)
89	6	YUDI WIDIARSONO, S.Kom	19800917 201101 1 004	Staf Bag. Umum dan Keuangan	Penata (III/c)
90	7	DWI KRISYANTO, SE.,SH.,MH	19820904 201101 1 012	Staf Kepaniteraan PHI	Penata (III/c)
91	8	SHEILA POSITA, SH.,MH	19880325 201503 2 001	Staf Kepaniteraan Perdata	Penata Muda Tk.I (III/b)
92	9	TAUFIK HENDRAWAN, SE	19861122 201101 1 004	Staf Kepaniteraan Perdata	Penata Muda (III/a)
93	10	NOVITA DIASTUTI, A.Md	19891126 201503 2 003	Staf Bag.Kepeg. Org dan Tata Laks	Pengatur Tk I (II/d)
94	11	MOH. RUSDIANTO	19721216 199303 1 001	Staf Bag. Umum dan Keuangan	Pengatur (II/c)
95	12	NINDYA YOSDALU PUTRA	19780619 201408 1 003	Staf Kepaniteraan Hukum	Pengatur Muda Tk.I(II/b)
96	13	NUGRAHA ABDILLAH, S.Kom	19910203 201903 1 005	CPNS	Penata Muda (III/a)

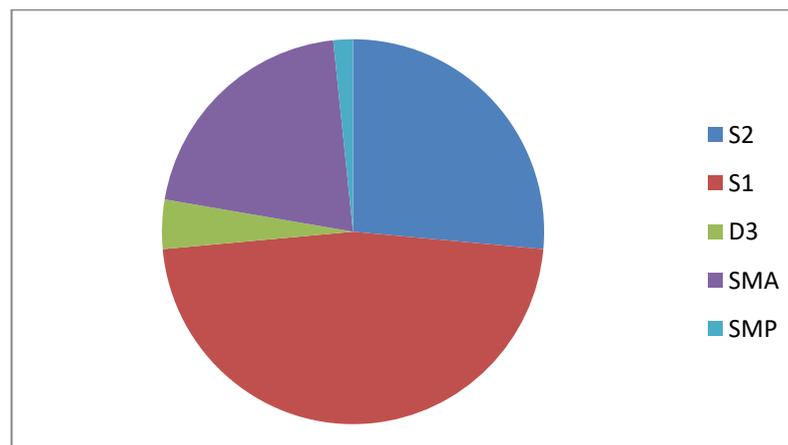
HAKIM AD HOC PHI					
97	1	DANI RUSDIYAH, ST.SH		HAKIM AD HOC PHI	
98	2	DIAH SUSILOWATI,SH		HAKIM AD HOC PHI	
99	3	RIHATIN BOEDIJONO, SH.MH		HAKIM AD HOC PHI	
HAKIM AD HOC TIPIKOR					
100	1	SAMSUL HADI,SH.MSc		HAKIM AD HOC TIPIKOR	
101	2	RINA LISTYOWATI,SH.,MH		HAKIM AD HOC TIPIKOR	
102	3	SYAMSUL BAHRI, SH		HAKIM AD HOC TIPIKOR	
103	4	ENCANG HERMAWAN, SH		HAKIM AD HOC TIPIKOR	
HONORER					
104	1	DONI SURIPTO		TENAGA HONORER	
105	2	KEMAS INDARTO		TENAGA HONORER	
106	3	ERSAN		TENAGA HONORER	
107	4	WIRIT WINOTO		TENAGA HONORER	
108	5	NGADIYO		TENAGA HONORER	
109	6	BAMBANG NUGROHO A MARTANTYO		TENAGA HONORER	
110	7	BUDI PRASETYO		TENAGA HONORER	
111	8	ANDIK SULISTYO		TENAGA HONORER	
112	9	TOMY NUGROHO		TENAGA HONORER	
113	10	SUGITO		TENAGA HONORER	
114	11	DENY DWI SUSILO		TENAGA HONORER	
115	12	PEBRIANTO		TENAGA HONORER	
116	13	SAPTO BAHTIAR		TENAGA HONORER	
117	14	FAHMI HIDAYAT		TENAGA HONORER	
118	15	SUDARMADI		TENAGA HONORER	
119	16	ARIF PRIHENDARTO		TENAGA HONORER	
120	17	DWI RIYANTO		TENAGA HONORER	
121	18	TUNJUNG SULAKSANA P		TENAGA HONORER	
122	19	DIAH SUKORINI,SH		TENAGA HONORER	
123	20	ANGGA PERDANA PUTRA		TENAGA HONORER	

**Tabel 3.2 : Rekapitulasi Sumber Daya Manusia Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2019**

No	Satuan Kerja	Tipe / Kelas	Hakim (36 Orang)						Teknis (50 Orang)						Non Teknis (103 Orang)				Jml
			Ketua	Wakil Ketua	Hakim	Hakim Ad Hoc Tipikor	Hakim Ad Hoc PHI	Hakim Yustisial	Panitera	Wakil Panitera	Panitera Muda	Panitera Pengganti	Juru Sita	Juru Sita Pengganti	Sekretaris	Ka Bagian	Ka Sub Bagian	Staf	
1	PN Yogyakarta	IA	1	1	27	4	3		1		5	27	6	11	1		3	13	103
<b>Jumlah</b>			1	1	27	4	3		1		5	27	6	11	1		3	13	103

Secara lebih terperinci, keadaan Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dan berdasarkan Pangkat / Golongan dan Pendidikan adalah sebagai berikut :

**Grafik 3.1 Keadaan Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pendidikan**



## D. MUTASI

Rekapitulasi mutasi Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tahun 2019 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.3 : Rekapitulasi Mutasi Hakim dan Pegawai Tahun 2019**

No	Satuan Kerja	Tipe / Kelas	Mutasi Masuk				Mutasi Keluar			
			Hakim	Teknis	Non Teknis	Jumlah	Hakim	Teknis	Non Teknis	Jumlah
1	PN Yogyakarta	IA	6	11	1	18	4	3	2	9
<b>Jumlah</b>			6	11	1	18	4	3	2	9

### MUTASI MASUK

#### 1. HAKIM

**Tabel 3.4 : Mutasi Hakim Masuk**

NO	NAMA	SATKER ASAL	TMT
1	NASRULLOH, SH	PN Nunukan	21/01/2019
2	SUPARMAN, SH.,MH	PN Bengkulu	01/02/2019
3	WIYANTO, SH.,MH	PN Marisa	27/05/2019
4	PURNAMA, SH.,MH	PN Sampang	10/06/2019
5	FRIDA ARIYANI, SH.,M.Hum	PN Banjarmasin	15/06/2019
6	AGUS SETIAWAN. SH.,Sp.Not	PN Pasangkayu	24/06/2019

#### 2. TEKNIS

**Tabel 3.5 : Mutasi Tenaga Teknis Masuk**

NO	NAMA	SATKER ASAL	TMT
1	SRI SUWANTI, SH	PN Wates	04/03/2019



2	NUNUNG DIAH RST, SH	PN Sleman	04/03/2019
3	RULLIANA YUDAWATI, SH	PN Bantul	04/03/2019
4	RIKE SIMBALLAGO, SH	PN Bantul	04/03/2019
5	NAFISATUN ANNA FU, SH	PN Mungkid	12/08/2019
6	THESIANA MAYA FA, SH.,MH	PN Sleman	23/08/2019
7	HERI SANTOSA, SH	PN Wates	26/08/2019
8	A.ANDI SUSANTO, SH	PN Sleman	27/08/2019
9	YUDHA AYU TIMORNIYATI, SH	PN Bantul	28/08/2019
10	NANANG S, SE, SH.,M.Kn	PN Sleman	29/08/2019
11	DEWI INDRIYANI, SH	PN Bantul	02/09/2019

### 3. NON TEKNIS

**Tabel 3.6 : Mutasi Tenaga Teknis Non Teknis Masuk**

NO	NAMA	SATKER ASAL	TMT
1	WIDODO BUDI SANTOSO, SH	PT YOGYAKARTA	19/11/2019

### MUTASI KELUAR

#### 1. HAKIM

**Tabel 3.7 : Mutasi Hakim Keluar**

NO	NAMA	SATKER TUJUAN	TMT
1	LOISE BETTI SILITONGA, SH.,MH	PT Bengkulu	17/01/2019
2	SOESILO, SH.,MH	PT Banjarmasin	21/01/2019
3	SUGENG WARNANTO, SH	PN Semarang	11/06/2019
4	K.PANDU KESUMA H, SH.,MH	PN Bantul	19/06/2019



## 2. TEKNIS

Tabel 3.8 : Mutasi Teknis Keluar

NO	NAMA	SATKER ASAL	TMT
1	INDARYATI MARIA	PT Banjarmasin	11/01/2019
2	HARSONO, SH	PN Sleman	04/03/2019
3	MIRA PUSPITASARI, SH	PT Yogyakarta	06/03/2019

## 3. NON TEKNIS

Tabel 3.9 : Mutasi Non Teknis Keluar

NO	NAMA	SATKER ASAL	TMT
1	PRASETYA SUJADI, SH	PN Bantul	06/09/2019
2	NURHIDAYAT, SH	PT Yogyakarta	22/11/2019

## E. PROMOSI

Rekapitulasi promosi Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.10 : Rekapitulasi Promosi Hakim dan Pegawai Tahun 2019

No	Satuan Kerja	Tipe / Kelas	Promosi Sebagai						Jumlah
			Ketua	Wakil Ketua	Panitera	Sekretaris	Panmud	Kasubbag	
1	PN Yogyakarta	IA	1	1	-	-	1	2	4
<b>Jumlah</b>			1	1	-	-	1	2	4



## PROMOSI

Tabel 3.11 : Promosi Hakim dan Pegawai Tahun 2019

NO	NAMA	PROMOSI SEBAGAI	TMT
1	BUDI PRSETYO, SH.,MH	Ketua	16/09/2019
2	K.PANDU KESUMA H, SH.,MH	Wakil Ketua	19/06/2019
3	DIAN UMAWATI, SH.,MH	Panitera Muda Hukum	25/07/2019
4	EVENDI NUGROHO, ST	Kasubbag Kepeg & Ortala	16/04/2019
5	YENNY VIKKY E, ST.,SH.,M.Eng	Kasubbag PTIP	22/11/2019

## F. PENSIUN

Rekapitulasi pensiun Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.12 : Rekapitulasi Pensiun Hakim dan Pegawai Tahun 2019

No	Satuan Kerja	Tipe / Kelas	Batas Usia Pensiun	Meninggal	Pensiun Dini	Jumlah
1	PN Yogyakarta	IA	6	1	-	7
<b>Jumlah</b>			6	1	-	7

Tabel 3.13 Hakim dan Pegawai yang telah menjalani masa pensiun pada tahun 2019

NO	NAMA	JABATAN	TANGGAL MASUK
1	SRI ENDANG MULYANI, SH	KASUBAG KEPEG, KORTALA	01/04/2019
2	M.DJANELANI, SH	HAKIM PN YOGYAKARTA	01/05/2019
3	RETNO PURWANTINI R	JSP PN YOGYAKARTA	01/06/2019
4	MADAHPUTRI ADI CAHYANI,SH	STAF	09/07/2019
5	SUPARNO	JSP PN YOGYAKARTA	01/09/2019
6	ADITA NURBANINGRUM, SH	SEKRETARIS PN YOGYAKARTA	01-10-2019
7	HT ERNING MARYATI	JSP PN YOGYAKARTA	01/10/2019



## G. DIKLAT

Rekapitulasi Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tahun 2019 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.14 : Rekapitulasi Diklat Hakim dan Pegawai Tahun 2019**

No	Satuan Kerja	Tipe / Kelas	Jenis Diklat				Jumlah
			Diklat PIM III	Diklat PIM IV	Diklat Teknis	Diklat Fungsional	
1	PN Yogyakarta	IA	-	-	4	-	
<b>Jumlah</b>			-	-	4	-	

**Tabel 3.15 : Diklat Hakim dan Pegawai Tahun 2019**

NO	PESERTA	PELATIHAN	TANGGAL	TEMPAT
1	ASEP PERMANA	Sertifikasi Hakim Niaga Haki	23/06/2019	Bogor
2	ASEP PERMANA	Sertifikasi Hakim Niaga /Kepailitan	01/05/2019	Bogor
3	TRI RISWANTI, SH.,M.Hum	SPPA	07/04/2019	Bogor
4	TRI RISWANTI, SH.,M.Hum	Pelatihan Pemeriksaan Bukti Elektronik	02/09/2019	Bogor



**BAB IV**  
**PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI**

**A. PENGELOLAAN KEUANGAN**

**1. PENGELOLAAN ANGGARAN DIPA**

**Tabel 3.16**  
**REKAPITULASI**  
**LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA**  
**TAHUN ANGGARAN 2018 DAN TAHUN ANGGARAN 2019**

NO.	JENIS BELANJA	TAHUN 2018				TAHUN 2019			
		PAGU DIPA	REALISASI		SISA DANA	PAGU DIPA	REALISASI		SISA DANA
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	Rp	%	Rp
<b>1</b>	<b>Pengadilan Negeri Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA</b>								
	B. Pegawai					14.535.826.000	17.339.513.106	119,29	(2.803.687.106)
	B. Barang Opr					1.958.452.000	1.843.493.356	94,46	114.958.644
	B. Barang Non Opr					77.975.000	76.296.852	97,85	1.678.148
	B. Modal					636.769.000	633.383.450	99,47	3.385.550
	<b>Jumlah 01</b>					<b>17.209.022.000</b>	<b>19.892.686.764</b>	<b>115,59</b>	<b>(2.683.664.764)</b>
	B. Barang (03)					303.733.000	287.223.600	94,56	16.509.400
	<b>Jumlah 03</b>					<b>303.733.000</b>	<b>287.223.600</b>	<b>94,56</b>	<b>16.509.400</b>



Keterangan :

a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya

1. Belanja Pegawai

Terjadi sisa pagu dalam penyerapan anggaran sebesar Rp 38.424.231,- untuk belanja pegawai karena adanya pembayaran belanja Gaji pokok, Tunjangan Fungsional PNS dan Uang makan PNS pada tahun 2019

2. Belanja Barang Operasional

Terjadi sisa pagu dalam penyerapan anggaran sebesar Rp 43.497.604,- untuk belanja sewa rumah dinas hakim (522141) dan belanja perjalanan dinas (524111)

3. Belanja Barang Non Operasional

Terjadi sisa pagu penyerapan anggaran sebesar Rp 0,-

b. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Terjadi sisa pagu penyerapan anggaran sebesar Rp 0,- untuk belanja modal

c. Program Peningkatan Manajemen Peradilan

Terjadi sisa pagu anggaran sebesar Rp 5.058.000,- dalam manajemen peradilan (dipa badan peradilan umum)/ Belanja Barang karena terdapat sisa dalam penyelesaian perkara karena hal-hal sebagai berikut :

- 1 1049.005.003.051 : Penggandaan dan penjilidan berkas perkara pidana, tidak terserap disebabkan karena bagian Kepaniteraan Pidana untuk mempercepat pelayanan lebih memilih mencetak ulang file dari computer dari padaharus foto copy keluar kantor.
- 2 1049.005.004.054 : Penggandaan dan penjilidan berkas perkara pidana yang melakkan upaya hukum disebabkan karena kurangnya komunikasi antara Keapaniteraan dengan Kejaksaan.
- 3 1049.005.004.057 : Karena tidak ada tagihan kwitansi biaya pengiriman ke Mahkamah Agung /kasasi dan peninjauan kembali untuk pemberkasan yang masuk ke bendahara.
- 4 1049.005.005.052 : Karena tidak ada tagihan kwitansi biaya pengiriman ke untuk penetapan hari sidang (Tipikor) ke Kejaksaan yang masuk ke bendahara.
- 5 1049.005.004.057 : Bahwa anggaran untuk pengiriman berkas perkara banding (PHI) ke Pengadilan Tinggi tidak terserap semua, dikarenakan biasanya pengiriman berkas perkara banding sifatnya segera, karena kebetulan jarak antara Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dekat, sehingga bekas perkara banding dikirim bersamaan dengan mengirim surat yang lain melalui kurir.

- 6 1049.005.005.057 : permohonan eksekusi hanya 1 perkara yang masuk, sehingga pelaksanaan eksekusi hanya selesai 1 perkara tersebut, sehingga sisa biaya eksekusi masih cukup besar.
- 7 1049.005.006.051 : permohonan perkara melalui pembebasan biaya perkara hanya 1 perkara yang masuk, sehingga pada pelaksanaannya hanya ada 1 perkara tersebut, sehingga sisa biaya perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara masih cukup besar.

Tabel 3.17

**REKAPITULASI PROSENTASE KENAIKAN REALISASI  
DIPA BADAN URUSAN ADMINISTRAS I ( 01 )**

NO	SATKER	2018	2019	PROSENTASE KENAIKAN
1	Pengadilan Negeri Yogyakarta	115,59%	99,66%	15,93%

Tabel 3.18

**REKAPITULASI PROSENTASE KENAIKAN REALISASI  
DIPA BADAN PERADILAN UMUM ( 03 )**

NO	SATKER	2018	2019	PROSENTASE KENAIKAN
1	Pengadilan Negeri Yogyakarta	94,56%	98,25%	3,69%

Tabel 3.19

**REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA TAMBAHAN (ABT)  
PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA  
DIPA BADAN URUSAN ADMINISTRASI ( 01)**

NO	JENIS BELANJA	2018	2019	KENAIKAN
	<b>PAGU AWAL</b>	<b>PAGU 2018</b>	<b>PAGU 2019</b>	<b>KENAIKAN</b>
1	DUKUNGAN MANAJEMEN	-	-	-
2	GAJI DAN TUNJANGAN	-	-	-
3	OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN KANTOR	-	-	-
4	BELANJA MODAL	-	-	-

NO	JENIS BELANJA	2018	2019	KENAIKAN
	<b>JUMLAH I</b>			
	<b>ABT</b>	<b>ABT 2018</b>	<b>ABT 2019</b>	<b>KENAIKAN</b>
1	BELANJA MODAL	-	37.500.000	-
2	OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN KANTOR	-	106.500.000	-
		-	-	-
	<b>JUMLAH II</b>	-	144.000.000	-
	<b>PAGU MINUS</b>	<b>ABT 2018</b>	<b>ABT 2019</b>	<b>KENAIKAN</b>
1	GAJI DAN TUNJANGAN	-	1.042.330.265	-
		-	1.042.330.265	-
	<b>TOTAL</b>	-	1.186.330.265	-

Tabel 3.20

**PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA  
DIPA BADAN PERADILAN UMUM ( 03 )**

NO	JENIS BELANJA	2018	2019	KENAIKAN
1	BELANJA BARANG	-	-	-
	<b>ABT</b>	<b>ABT 2018</b>	<b>ABT 2019</b>	<b>KENAIKAN</b>
1	BELANJA BARANG	-	-	-
	<b>TOTAL</b>	-	-	-

Untuk DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi) Anggaran Belanja Tambahan (ABT) tahun 2018 Rp. 252.300.000,- ABT gaji dan tunjangan dialokasikan untuk tambahan belanja uang makan pegawai dan Rp. 5.079.719.000 untuk tambahan belanja gaji pegawai. Sementara tahun 2019 sebesar Rp. 1.042.330.265 dialokasikan juga untuk tambahan belanja gaji pegawai. DIPA 03 (Badan Peradilan Umum) terdapat ABT sebesar Rp. 0,- .

## 2. PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)

Tabel 3.21

### LAPORAN REALISASI PENDAPATAN PNBP TAHUN ANGGARAN 2019

#### UNIT BADAN URUSAN ADMINISTRASI (01)

NO	MAP	URAIAN JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SISA TAHUN LALU	PENERIMAAN TAHUN INI	DISETOR TAHUN INI	SISA TAHUN INI
I	Pendapatan dan Pemindahan tanganan BMN			0	0	
	423121	Pendapatan Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	-	-	-	-
	423122	Pendapatan dari Penjualan Perlatan dan Mesin	-	-	-	-
	423129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN lainnya	-	-	-	-
<b>Jumlah I</b>			-	-	-	-
II	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN			-		
	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	6.669.683	25.066.966	25.066.966	-
	425132	Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	-	-	-	-
	425139	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	-	-	-	-
<b>Jumlah II</b>			6.669.683	25.066.966	25.066.966	-
III	Pendapatan Jasa			-		
	423221	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	-	-	-	-
	423291	Pendapatan Jasa Lainnya	-	-	-	-
<b>Jumlah III</b>			-	-	-	-
IV	Pendapatan Kejaksaan/Peradilan			-		
	423411	Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan	-	-	-	-
	425231	Pendapatan Pengesahan Surat Dibawah Tangan	-	-	-	-
	425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)	-	-	-	-
	425233	Pendapatan Ongkos Perkara	-	-	-	-

	425239	Pendapatan Kejaksanaan dan Peradilan Lainnya	-	-	-	-
Jumlah IV			-	-	-	-
V	Pendapatan Denda					
	425811	Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	2.854.482	2.854.482	-
Jumlah V			-	2.854.482	2.854.482	-
VI	Pendapatan dari Penerimaan Kembali Tahun Anggaran yang Lalu					
	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL)	-	2.243.880	2.243.880	
	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL)	-	-	-	-
	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	-	-
	425914	Penerimaan Kembali Belanja Pembayaran Kewajiban Utang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	-	-
	425918	Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	-	-
Jumlah VI			-	2.243.880	2.243.880	-
VII	Pendapatan Pelunasan Piutang					
	425931	Pendapatan Pelunasan Piutang Non Bendahara			-	-
	423922	Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang Diderita Oleh Negara (Masuk TP/TGR)	-	-	-	-
Jumlah VII			-	-	-	-
VIII	Pendapatan dari Penutupan Rekening					
	423931	Pendapatan dari Penutupan Rekening	-	-	-	-
Jumlah VIII			-	-	-	-
IX	Pendapatan Lain-lain					
	423119	Pendapatan Penjualan Lainnya	-	-	-	-
	425991	Penerimaan Kembali				-

		Persekot/Uang Muka Gaji	-	12.394.550	12.394.550	
	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain		-	-	
Jumlah IX			-	12.394.550	12.394.550	-
Jumlah I s/d IX			-	42.559.878	42.559.878	-

Tabel 3.22

LAPORAN REALISASI PENDAPATAN PNBP TAHUN ANGGARAN 2019

UNIT DIRJEN BADAN PERDAILAN UMUM (03)

NO	MAP	URAIAN JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SISA TAHUN LALU	PENERIMAAN TAHUN INI	DISETOR TAHUN INI	SISA TAHUN INI
I		Pendapatan dan Pemindahan tanganan BMN		0	0	
	423121	Pendapatan Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	0	0	0
	423122	Pendapatan dari Penjualan Perlatan dan Mesin	0	0	0	0
	423129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN lainnya	0	0	0	0
Jumlah I			0	0	0	0
II		Pendapatan dari Pemanfaatan BMN		0	0	
	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	0	0	0
	425132	Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
	425139	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	0	0	0	0
Jumlah II			0	0	0	0
III		Pendapatan Jasa		0	0	
	423221	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	0	0	0
	423291	Pendapatan Jasa Lainnya	0	0	0	0
Jumlah III			0	0	0	0
IV		Pendapatan Kejaksaan/Peradilan		0	0	
	423411	Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan	0	0	0	0
	425231	Pendapatan Pengesahan Surat	0	135.000	135.000	0

		Dibawah Tangan				
	425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)	0	2.121.000	2.121.000	0
	425233	Pendapatan Ongkos Perkara	0	15.160.000	15.160.000	0
	425239	Pendapatan Kejaksanaan dan Peradilan Lainnya	0	34.159.700	34.159.700	0
Jumlah IV			0	51.575.700	51.575.700	0
V	Pendapatan Denda		0	0	0	0
	425811	Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	0	0	0
Jumlah V			0	0	0	0
VI	Pendapatan dari Penerimaan Kembali Tahun Anggaran yang Lalu			0	0	
	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL)	0	0	0	0
	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL)	0	0	0	0
	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0	0
	425914	Penerimaan Kembali Belanja Pembayaran Kewajiban Utang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0	0
	425918	Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0	0
Jumlah VI			0	0	0	0
VII	Pendapatan Pelunasan Piutang			0	0	
	425931	Pendapatan Pelunasan Piutang Non Bendahara	0	0	0	0
	423922	Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang Diderita Oleh Negara (Masuk TP/TGR)	0	0	0	0
Jumlah VII			0	0	0	0
VIII	Pendapatan dari Penutupan Rekening			0	0	
	423931	Pendapatan dari Penutupan Rekening	0	0	0	0

Jumlah VIII			0	0	0	0
IX	Pendapatan Lain-lain			0	0	
	423119	Pendapatan Penjualan Lainnya	0	0	0	0
	425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	0	0	0
	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	0	0	0

## 2. LAPORAN KEUANGAN PERKARA

**Tabel 3.23 LAPORAN BIAYA KONSIGNASI**

Uraian	Keadaan Keuangan				Keterangan
	Saldo Awal	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir	
Saldo Awal					B. Lain lain terdiri dari B. Pelaksanaan Konsinyasi
Penerimaan (Uang Konsinyasi dan Panjar Konsinyasi)					
Biaya Pelaksanaan Penawaran					
Biaya pendaftaran					
Biaya Proses/ATK					
Redaksi					
Materai					
Leges					
Pengambilan Uang Konsinyasi					
Biaya Lain-lain					
Saldo Akhir					
Jumlah					

**Tabel 3.24 LAPORAN BIAYA PERKARA PERDATA KHUSUS (PHI)**

Uraian	Keadaan Keuangan				Keterangan
	Saldo Awal	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir	
Saldo Awal					
Penerimaan					
Biaya Proses/ATK/Pemberkasan*)					
Biaya Panggilan					
Biaya Penerjemah					
Biaya Pemberitahuan					
Biaya Sita					

Biaya Pemeriksaan Setempat					
Biaya Sumpah					
Biaya Saksi Ahli					
Biaya Pengiriman					
Biaya Materai					
PNBP Biaya Pendaftaran					
PNBP Redaksi					
PNBP Lain-lain					
Pengembalian Sisa Panjar					
Biaya Lain-lain					
Saldo Akhir					
Jumlah					

**Tabel 3.25 LAPORAN BIAYA EKSEKUSI PERKARA PERDATA KHUSUS (PHI)**

Uraian	Keadaan Keuangan				Keterangan
	Saldo Awal	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir	
Saldo Awal					
Penerimaan					
Biaya Materai					
Biaya Leges					
Biaya Sita Eksekusi					
Biaya Juru Sita					
Biaya Pengumuman Lelang/Iklan					
Biaya Juru Lelang					
Biaya Lelang					
Biaya Saksi					
Biaya Pemberitahuan					
Biaya Keamanan					
Pengembalian Sisa Panjar Eksekusi					

PNBP					
Lain-lain					
Saldo Akhir					
Jumlah					

**Tabel 3.26 LAPORAN REKAPITULASI BIAYA PERKARA PERDATA**

Uraian	Keadaan Keuangan					
	Saldo Awal	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir	Kas di Bank	Kas di Brankas
Biaya Perkara						
Biaya Eksekusi						
Biaya Konsinyasi						
Uang Titipan Perkara Pidana*)						
PHI*)						
Jumlah						

## B. . PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

### 1. Sarana dan Prasarana Gedung.

Ada 2 (dua) gedung Kantor. Pertama Gedung Kantor Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA Jl. Kapas No. 10 Yogyakarta dibangun diatas tanah seluas 7385 m2, terdiri dari 2 (dua) lantai, dan gedung Tipikor di Jl Prof Dr Soepomo 12 Yogyakarta dengan rincian sarana dan prasara gedung dan fasilitas perkantoran sebagai berikut:

**Tabel 3.27 SARANA DAN PRASARANA GEDUNG**

NO	URAIAN	SAT	KUANTITAS	NILAI
1	<b>TANAH</b>		<b>17,380</b>	<b>26.622.419,160</b>
2	Tanah	M2	6.832	6.563.471.000
3	TanahBancunanKantorPemerintah	M2	10.548	20.058.948.160
4	<b>PERALATAN DAN MESIN</b>		<b>1,181</b>	<b>4,876.386,962</b>
5	StationaryGeneratinaSet	Unit	1	249.565.000
6	Pompa Air	Unit	4	22.352.200
7	Sedan	Unit	3	561.395.800
8	StationWacon	Unit	3	434.259.000
9	SepedaMotor	Unit	12	155.992.000
10	MesinKetikManualPortable(11-	Buah	8	10.213.000
11	MesinKetikListrikPotable(11-13Inci)	Buah	2	4.840.000
12	MesinHitungManual	Buah	1	90.000
13	MesinFotocopyDoubleFolio	Buah	1	18.565.000
14	LemariBesi/Metal	Buah	25	45.162.000
15	LemariKavu	Buah	55	54.672.020
16	RakBesi	Buah	60	199.845.000
17	RakKavu	Buah	3	579.000
18	FilingCabinetBesi	Buah	19	21,294,800
19	Brandkas	Buah	5	39.783.360
20	Buffet	Buah	8	439.000
21	Locker	Buah	5	5.760.000
22	TabunaPemadamAoi	Buah	1	199.000
23	CCTV-	Buah	5	96.971.500
24	PapanVisual/PapanNama	Buah	3	7.935.000
25	AlatDetektorBarangTerlarang/XRay	Buah	3	1.341.000
26	MesinAbsensi	Buah	2	16.950.000
27	HandMetalDetector	Buah	3	5.100.000
28	PenangkalPetir	Buah	1	7.500.000
29	LCDProjector/Infocus	Buah	2	18.475.000
30	AlatKantorLainnva		1	34.900.000
31	MeiaKeriaKavu	Buah	148	210.336.800
32	KursiBesi/Metal	Buah	267	213.227.670
33	KursiKavu	Buah	54	41.675.000
34	Sice	Buah	15	27.100.000
35	BanakuPanianaBesi/Metal	Buah	31	67.842.400
36	BanakuPanianaKavu	Buah	60	32.615.600
37	MeiaRapat	Buah	3	4.730.000
38	MeiaKomputer	Buah	8	3.195.750
39	Meia Telepon	Buah	3	174.000
40	MeiaResepsionis	Buah	4	25.689.000
41	Sketsel	Buah	7	26.547.000
42	MeubelairLainnva		2	34.302.500

43	MesinPemotonaRumput	Buah	2	2.036.000
44	A.C. Split	Buah	51	343.959.001
45	PortableAirConditioner(AlatPendingin)	Buah	2	59.800.000
46	KipasAnain	Buah	8	12.770.000
47	Exhause Fan	Buah	4	3.200.000
48	Televisi	Buah	13	103.915.000
49	Amplifier	Buah	1	34.000
50	SoundSvstem	Buah	6	106.780.000
51	Wireless	Buah	1	8.000.000
52	Megaphone	Buah	2	1.000.000
53	Microphone	Buah	4	3.039.000
54	Unit PowerSupplv	Buah	7	9.014.000
55	CameraVideo	Buah	2	9.130.000
56	TimbanganBarana	Buah	1	724.000
57	LambanaGarudaPancasila	Buah	9	216.000
58	GambarPresiden/WakilPresiden	Buah	1	44.000
59	TianaBendera	Buah	9	7.381.100
60	Dispenser	Buah	2	389.000
61	Mimbar/Podium	Buah	1	174.000
62	PaluSidana	Buah	5	220.000
63	LambanaInstansi	Buah	1	4.475.828
64	Gordvin/Krav	Buah	1	45.820.000
65	AsbakTinaai	Buah	2	88.000
66	Lampu	Buah	7	27.409.400
67	AlatRumahTanaaaLainnva(		1	2.220.000
68	AudioMixingPortable	Buah	4	9.750.000
69	ProfessionalSoundSvstem	Buah	1	19.975.000
70	VoiceRecorder	Buah	6	4.800.000
71	CameraDigital	Buah	2	18.795.000
72	Telephone(PABX)	Buah	2	34.440.000
73	IntermediateTelephone/KevTeleph	Buah	6	22.000
74	PesawatTelephone	Buah	2	139.000
75	HandvTalkv(HT)	Buah	4	6.200.000
76	Facsimile	Buah	4	11.125.000
	Genset	Buah	1	134.966.100
78	MiniKomputer	Buah	3	46.350.000
79	P.C Unit	Buah	61	600.295.700
80	NoteBook	Buah	30	291.886.500
81	PersonalKomputerLainnva		1	18.998.000
82	Printer(PeralatanPersonalKomputer	Buah	41	77.220.333
83	Scanner(PeralatanPersonalKomput	Buah	3	15.958.000
84	PeralatanPersonalKomputerLainnv		11	25.300.000
85	Server	Buah	2	63.820.000
86	Router	Buah	4	8.233.600
87	Hub	Buah	1	1.500.000
88	WirelessAccessPoint	Buah	9	13.415.000
89	Peralatan Jaringan Lainnva	Buah	1	16.505.000
90	Alat TenisMeia	Buah	1	240.000
91	Rak Besi	Buah	4	196.000.000
92	Meja Kayu	Buah	2	10.000.000
93	Kursi / metal	Buah	23	53.000.000
94	A.C Split	Buah	2	19.500.000
95	Televisi	Buah	5	29.880.000
96	Amplifier	Buah	1	7.150.000
97	Camera Video	Buah	4	55.300.000
98	P.C Unit	Buah	2	18.620.000
99	Note Book	Buah	10	125.000.000

100	Personal Komouter Lainnva	Buah	1	57.622.000
101	CPU (Peralatan Personal	Buah	4	9.170.000
102				
103	<b>GEDUNGDANBANGUNAN</b>		<b>32</b>	<b>12.221.212.450</b>
104	BanqunanGedunaKantorPermanen	Unit	2	8.575.612.200
105	BanqunanOlahRaca	Unit	1	169.000.000
106	GedunaPos Jaaa Permanen	Unit	3	104.569.100
107	GedunaGarasi/PoolPermanen	Unit	1	104.912.250
108	BanqunanGedunaTempatKeriaLain	Unit	1	70.479.400
109	BanqunanTempatParkir	Unit	1	410.708.300
110	BanqunanGedunaTempatKeriaLain		1	50.215.000
111	RumahNegaraGolonganI	Unit	2	438.000.000
112	RumahNegaraGolonganI	Unit	17	2.033.834.000
113	PadarPermanen	Unit	3	263.882.200
114	<b>IRIGASI</b>		<b>2</b>	<b>165.636.500</b>
115	BanqunanPenampunaAir Baku	Unit	1	66.205.400
116	BanqunanMenara/BakPenampuna/	Unit	1	99.431.100
117	<b>JARINGAN</b>		<b>2</b>	<b>154.735.500</b>
118	SumurGali(SGL)	Unit	1	2.084.800
119	JaringanDistribusiTeqanganDiatas2	Unit	1	152.650.700
120	<b>ASET TETAP LAINNYA</b>		<b>12.606</b>	<b>106.697.140</b>
121	Monorafu	Buah	12.569	100.585.062
122	Referensi	Buah	18	2.683.400
123	BukuLainnva		18	2.828.678
124	CD/VCD/DVD/LD	Buah	1	600.000
125	<b>ASET TETAP YANG TIDAK DIGUN</b>		<b>463</b>	<b>73.276.000</b>
126	MesinKetikManualPortable(11-	Buah	15	1.409.000
127	LemariBesi/Metal	Buah	5	615.000
128	LemariKavu	Buah	17	1.062.000
129	RakBesi	Buah	10	8.100.000
130	RakKavu	Buah	39	3.364.000
131	FilinaCabinetBesi	Buah	6	311.000
132	PananVisual/PananNama	Buah	28	731.000
133	MeiaKeriaKavu	Buah	83	7.480.000
134	KursiBesi/Metal	Buah	177	25.653.000
135	KursiKavu	Buah	14	336.000
136	BanakuPanianaKavu	Buah	4	116.000
137	JamMekanis	Buah	11	117.000
138	A.C. Split	Buah	1	7.400.000
139	KipasAnain	Buah	13	223.000
140	TapeRecorder(AlatRumahTanqaaL	Buah	1	44.000
141	Loudspeaker	Buah	4	32.000
142	Megaphone	Buah	1	58.000
143	LambanGarudaPancasila	Buah	3	18.000
144	TianaBendera	Buah	7	192.000
145	LambanInstansi	Buah	6	133.000
146	Gordvin/Krav	Buah	11	264.000
147	Facsimile	Buah	1	242.000
148	P.C Unit	Buah	6	15.376.000

**Tabel 3.28 RUANG PADA GEDUNG PERKANTORAN :**

No	Nama	Jumlah	Keterangan
1	Ruang Ketua	2	1 di PN, 1 di Tipikor
2	Ruang Wakil Ketua	1	di PN

3	Ruang Hakim	9	5 di PN dan 4 di Tipikor
4	Ruang Panitera	1	di PN
5	Ruang Sekretaris	1	di PN
6	Ruang Sidang Umum	5	di PN
7	Ruang Sidang Anak	1	di PN
8	Ruang Sidang Tipikor	1	di Tipikor
9	Ruang Sidang PHI	1	di Tipikor
10	Ruang Tunggu	3	2 di PN, 1 di Tipikor
11	Ruang Mediasi	1	di PN
12	Ruang Tahanan	4	2 di PN, 2 di Tipikor
13	Ruang Kepaniteraan	5	3 di PN, 2 Tipikor
14	Ruang Kesekretariatan	3	di PN
15	Ruang Pelayanan (PTSP)	1	di PN
16	Ruang Perpustakaan	1	di PN
17	Ruang Jaksa	2	1 di PN, 1 di Tipikor
18	Ruang Kesehatan	1	di PN
19	Ruang Tunggu Anak Tidak ditahan	1	di PN
20	Ruang Tunggu Ramah Anak	1	di PN
21	Ruang Pekerja Sosial	1	di PN
22	Ruang Arsip Perkara	4	di PN
23	Ruang Posbakum	1	di PN
24	Ruang APM &RB	1	di PN
25	Ruang Aula	1	di PN
26	Ruang Server	2	1 di PN, 1 di Tipikor
27	Ruang E-Cort	1	di PN
28	Ruang Inzage	1	di PN
29	Ruang Teleconferen	1	di PN
30	Ruang Kukus	1	di PN
31	Ruang Pengasuhan Anak	1	di PN
32	ruang Lactasi	1	di PN

**Tabel 3.29 KENDARAAN DINAS**

No	Nama	Tahun Perolehan	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
<b>I</b>	<b>Kendaraan Dinas Roda 4</b>					
1	TOYOTA COROLLA ALTIS	2008	V	-	-	
2	TOYOTA VIOS	2010	V	-	-	
3	TOYOTA VIOS	2004	V	-	-	
4	TOYOTA INNOVA V	2011	V	-	-	
5	TOYOTA INNOVA G	2006	V	-	-	
6	TOYOTA KIJANG KF 40	1993	-	V	-	
7	TOYOTA KIJANG LX					Pinjam pakai dari Pemkot Yogyakarta
<b>II</b>	<b>Kendaraan Dinas Roda 2</b>					
1	HONDA SUPRA X 125	2011	V	-	-	
2	HONDA SUPRA X 125	2009	V	-	-	

3	HONDA SUPRA X 125	2009	V	-	-	
4	HONDA SUPRA FIT X	2008	V	-	-	
5	HONDA SUPRA FIT	2007	V	-	-	
6	HONDA SUPRA FIT	2006	V	-	-	
7	HONDA SUPRA FIT	2006	V	-	-	
8	HONDA SUPRA FIT	2006	V	-	-	
9	HONDA GP III MEGA PRO	2006	V	-	-	
10	HONDA GP III MEGA PRO	2007	V	-	-	
11	HONDA NF 100 D	2002	V	-	-	
12	HONDA GL. IIISPORT	2003	V	-	-	

**Tabel 3.30 RUMAH DINAS**

No	Uraian	Jumlah	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Rumah Dinas Ketua	1	1			
2	Rumah Dinas Wakil Ketua	1	1			
3	Rumah Dinas Hakim	15	5	10	0	
4	Rumah Dinas Panitera	1				
5	Rumah Dinas Sekretaris	1				

### C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI.

Untuk mendorong terwujudnya Badan Peradilan yang Agung, Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta kelas IA melakukan pembenahan Tehnologi Informasi ( TI ) sebagai salah satu prioritas perubahan, yang diharapkan dapat memiliki Sistem informasi yang menjamin keterbukaan informasi, akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi serta menjadi organisasi yang modern dengan berbasis Teknologi Informasi terpadu. Kebijakan yang diambil salah satunya adalah dengan pendampingan secara terus menerus baik dari tingkat supervisi, operator maupun user dalam implementasi dari masing - masing aplikasi dilakukan secara rutin. Sedangkan sarana dan prasaran IT :

#### a. Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)

Manajemen administrasi perkara diinternal Pengadilan Negeri Yogyakarta dijalankan oleh seluruh kepaniteraan Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta kelas IA beserta Panitera Pengganti dengan dukungan dari bagian Perencanaan, IT dan Pelaporan. Sampai saat ini Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta kelas IA telah menerapkan SIPP versi 3.2.0-5 yang telah terintegrasi dengan SIPP Pengadilan Tinggi Yogyakarta maupun Mahkamah Agung baik SIAP maupun Direktori Putusan MA. Data sudah termutakhirkan berdasarkan kondisi data perkara yang sebenarnya.

Dalam implementasi SIPP, diadakan pelatihan, evaluasi dan monitoring setiap minggu, yaitu pada hari senin untuk Panitera Pengganti, dan hari selasa untuk para Hakim.

Indikator kinerja, kepatuhan pemasukan (input) data, kelengkapan data dan validasi data adalah prasyarat mutlak dalam pengisian SIPP. Keempat indikator tersebut menjadikan implementasi SIPP tidak cukup sekedar mengejar warna hijau semata, terlebih dilakukan dengan cara-cara yang tidak semestinya.

Adapun link SIPP untuk masyarakat umum dan pencari keadilan dapat diakses di :

<http://sipp.pn-yogyakarta.go.id/>

No	Perkara	Ada Bulan Lalu	Masuk	Pulus	Rasio Penyelesaian Perkara	Ada	Bandung	Kapas	Peninjauan Kembali	Ekskusi	Orasi
1	Gugatan	49	3	8	244,67 %	44	1				
2	Permisian	12	6	7	116,67 %	11					
3	Kapasitas				0,00 %						
4	Penyusunan Kuwalitas Pembayaran Utang				0,00 %						
5	Hak Eksploitasi Intelektual				0,00 %						
6	Pengadilan Hubungan Internasional	11		1	100,00 %	10		1			
7	Perlawanan/Bantahan (dengan visasi)	3		1	100,00 %	2					
8	Gugatan Perdata				0,00 %						
9	Pidana Benda	48	14	22	147,14 %	40					
10	Pidana Sengaja				0,00 %						
11	Pidana Cepak		26	25	100,00 %						
12	Perkara Lalu Lintas		601	601	100,00 %						
13	Wakil Pidana Korporel		1		0,00 %	1					
14	Pidana Abais		1		0,00 %	1					

## b. e-COURT Mahkamah Agung RI

Sehubungan dengan adanya Perma Nomor 3 Tahun 2019 tentang Administrasi perkara di pengadilan secara elektronik, bersama ini kami laporkan sebagai berikut :

- a. Bahwa Pengadilan Negeri Yogyakarta telah melakukan rapat dan sosialisasi dengan para hakim, panitera pengganti, jurusita, jurusita pengganti dan Peradi mengenai Perma tersebut yaitu :
  - Tanggal 3 Juli 2019 FGD implementasi e-court dengan para hakim
  - Tanggal 2 Juli 2019 FGD implementasi e-court dengan Panitera Pengganti, jurusita dan jurusita pengganti;
  - Tanggal 25 Juli 2019 rapat koordinasi implementasi e-court dengan Pengadilan Negeri Sleman.
  - Tanggal 26 Juli 2019 rapat persiapan sosialisasi e-court dengan Advokat seluruh wilayah DIY
  - Tanggal 31 Juli 2019 sosialisasi Perma No 3 Tahun 2019 dan Implementasi E-Court dengan Ketua Pengadilan Negeri se-wilayah Pengadilan Tinggi Yogyakarta, para penasihat hukum dan kepala biro hukum instansi terkait di Yogyakarta;

- Tanggal 10 Agustus 2019 sosialisasi Perma No 3 Tahun 2019 dan Implementasi E-Court dengan Ikadin Cabang Yogyakarta;
  - Tanggal 30 Agustus 2019 sosialisasi Perma No 3 Tahun 2019 dan Implementasi E-Court dengan PERADI Kota Yogyakarta
- b. Bahwa untuk mendukung pelaksanaan E-Court, telah disiapkan **corner E Court** untuk mendaftarkan perkara secara elektronik dengan disediakan ruangan sendiri dengan perlengkapannya.



No	Jumlah Pendaftaran (dibayar)	Berhasil Nomor Perkara
1	1 Perkara	1 Perkara



c. Website Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA

Website Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA dapat diakses di: <http://pn-yogyakarta.go.id>  
Website tersebut berisi profil, transparansi laporan, kegiatan, berita pengadilan, persyaratan, info perkara, putusan dan pengumuman Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta kelas IA



d. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI

Direktori Putusan Mahkamah Agung RI untuk Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA dapat diakses di: <http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-yogyakarta>  
Direktori Putusan merupakan aplikasi yang digunakan untuk mengupload perkara yang menempuh upaya hukum baik banding, kasasi maupun PK dan perkara tingkat pertama yang telah berkekuatan hukum tetap. Namun setelah implementasi SIPP versi 3.2.0, data putusan merupakan hasil sinkronisasi dari SIPP pengadilan.



### e. Aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebuah instrumen Pengadilan Negeri sebagai bentuk kemudahan dan kecepatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal kegiatan pendaftaran surat masuk dan keluar, buku tamu, permohonan surat keterangan, permohonan penyitaan dan penggeledahan. Dimana staf pengadilan akan menghemat waktu dalam melakukan pembuatan dokumen atau pemberian informasi kepada masyarakat. Adapun ruang lingkup aplikasi PTSP :Register Surat

- Register Surat Keterangan
- Register Buku Tamu
- Register Penyitaan
- Register Penggeledahan

#	TGL DISPOSISI	DARI	KETERANGAN
1	09/01/2018	WY001/66/KC/001/2018	PN JAKARTA TIMUR
2	09/01/2018	W1332/154/KC/014/2018	PN SEMARANG
3	09/01/2018	W1001/100/KC/021/2018.JSP.18	PN JAKARTA SELATAN
4	09/01/2018	228/SK/PA/1/KC/01/2018	SEKRETARIS MA-RI
5	09/01/2018	B-60/LS/PA/1/01/2018	KEJATI YK
6	09/01/2018	W1001/25/KC/001/2018	PN JAKARTA TIMUR
7	09/01/2018	W1001/044/KC/001/2018	PN JAKARTA TIMUR

### f. Aplikasi Antrian Sidang

Antrian Sidang Pengadilan Negeri Yogyakarta adalah layanan kepada Pencari Keadilan dimana Para Pihak yang berperkara akan dipanggil dan disebut nama pihak untuk memasuki ruang sidang dengan sistem yang sudah terkoneksi dengan Aplikasi Absensi Pihak (Roll Sidang) di Meja Informasi dan Terkoneksi dengan data perkara di SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara).

Aplikasi ini berdasarkan kedatangan dan kelengkapan para pihak, yaitu dengan cara para pihak melaporkan kedatangan ke meja informasi. Para pihak yang sudah lengkap akan disidangkan terlebih dahulu, disamping itu masyarakat dapat mengetahui persidangan suatu perkara berkaitan dengan ruang sidang, status persidangan atau sudah selesai sidang.

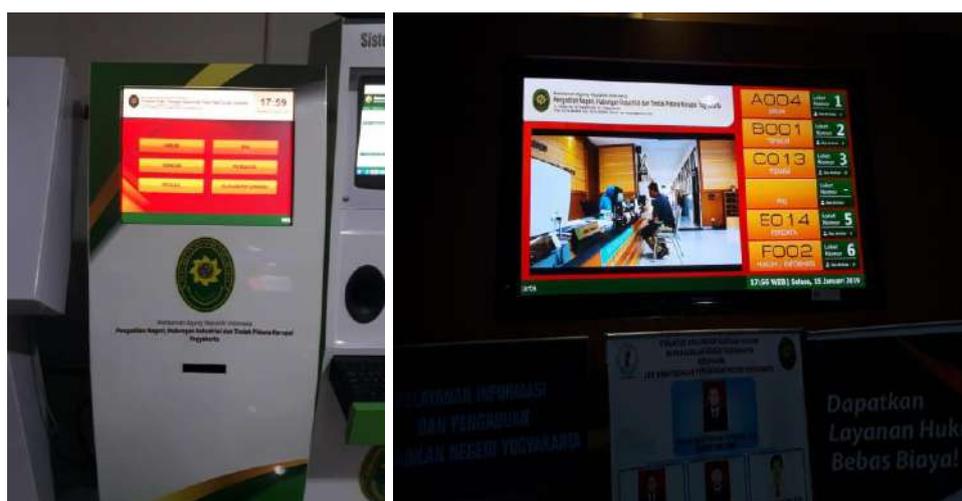
Pemanggilan Pihak dapat dilakukan dengan menggunakan Personal Komputer, Laptop atau Handphone Android.

Dengan adanya aplikasi ini diharapkan adanya peningkatan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap layanan pengadilan khususnya Pengadilan Negeri Yogyakarta.



#### g. Aplikasi Antrian Pelayanan / PTSP

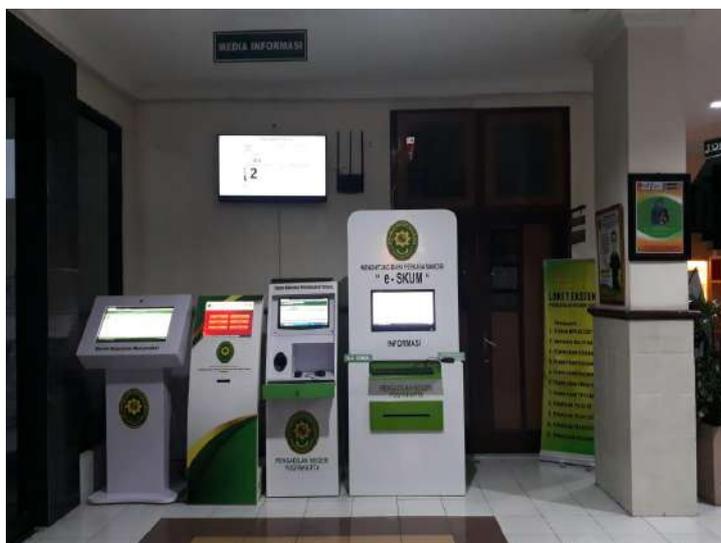
Antrian Pelayanan Pengadilan Negeri Yogyakarta adalah layanan kepada Pencari Keadilan dimana pencari keadilan akan dipanggil sesuai dengan nomor urut antrian dengan sistem yang sudah terkoneksi dengan Aplikasi di Meja PTSP dan dan Media Informasi.



#### h. Aplikasi ESKUM

e-SKUM adalah Sistem Aplikasi Menghitung Sendiri Panjar Biaya Perkara yang dilakukan oleh Para Pencari Keadilan di Lobby Utama dengan menggunakan alat e-SKUM.

Maksud dan Tujuan dalam penerapan Sistem Aplikasi e-SKUM adalah untuk memberikan pelayanan terbaik serta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan tujuan akhir terciptanya peningkatan kualitas pelayanan publik di pengadilan agar pelayanan peradilan dapat terselenggara lebih cepat, sederhana dan berbiaya ringan.



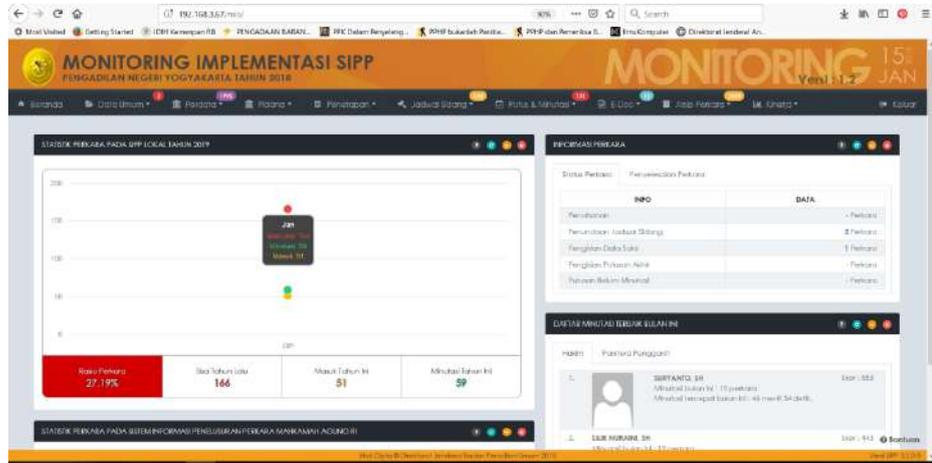
#### i. Aplikasi ATR

Aplikasi Transkrip Persidangan (ATP) adalah sebuah inovasi aplikasi peradilan yang dibuat untuk merubah proses administratif peradilan dari konvensional menjadi berbasis teknologi informasi. Aplikasi ini digunakan untuk merekam suara pembicara dalam proses persidangan yang kemudian dikonversi dalam bentuk text didalam komputer dan dikemas menjadi sebuah trasnkrip persdiangan.



#### j. Aplikasi Monitoring SIPP

Aplikasi Monitoring adalah sebuah aplikasi turunan dari SIPP yang digunakan untuk memonitoring dan evaluasi implementasi SIPP di pengadilan. Fitur-fitur aplikasi monitoring cukup membantu dalam evaluasi dan pengawasan internal, namun sangat perlu dikembangkan lagi sesuai kebutuhan terhadap informasi pengawasan SIPP.



**k. SMS gateway Mahkamah Agung**

Merupakan aplikasi laporan keadaan perkara, laporan bantuan hukum dan pos bantuan hukum. Yang bertanggung jawab terhadap isi data: Kepaniteraan Perdata, Kepaniteraan Pidana, Kepaniteraan PHI dan Kepaiteraan Tipikor. Aplikasi tersebut dapat diakses di : <http://sms.mahkamahagung.go.id/index.php/main/index/1>

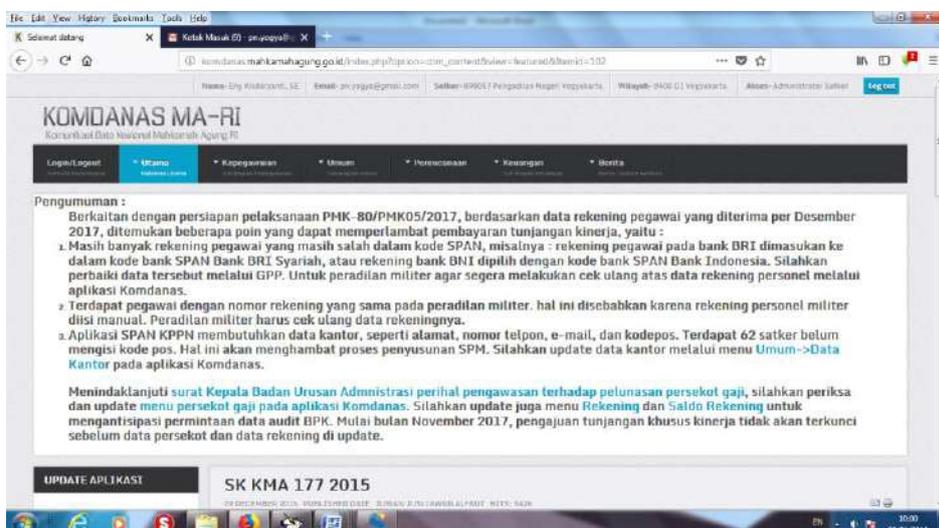
**l. Audio Visual Perekam Sidang Tipikor**

Software perekam persidangan yang dapat digunakan mereview jalannya persidangan tipikor.

**m. KOMDANAS**

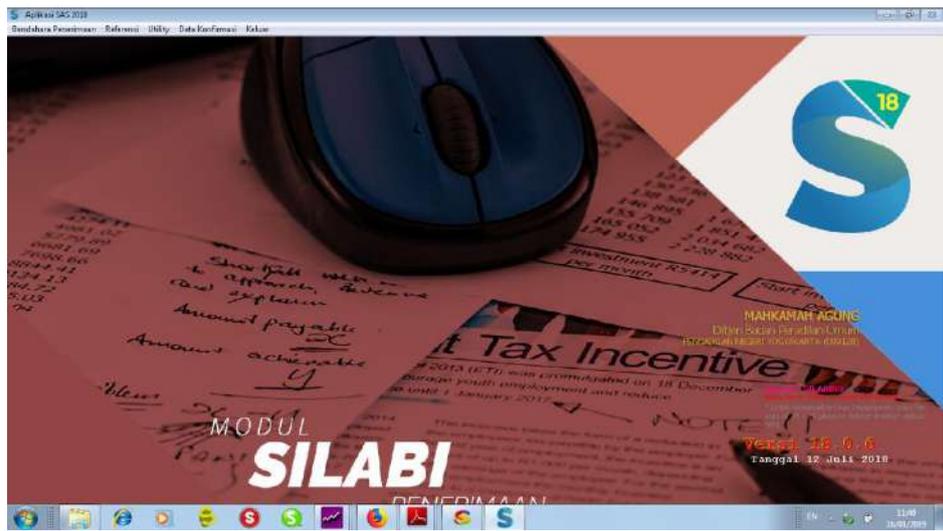
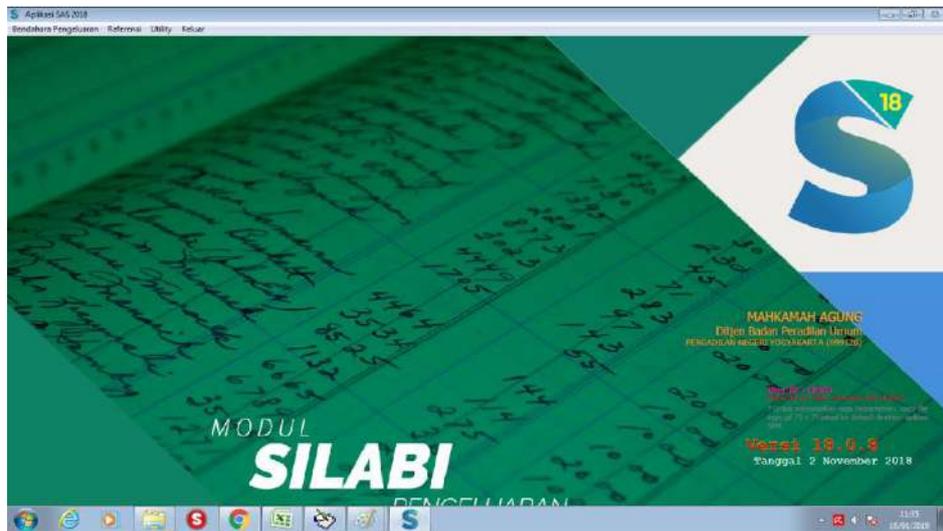
Merupakan aplikasi laporan kegiatan dan komunikasi data nasional bagian Kepegawaian, Keuangan dan Umum, Perencanaan, IT dan Pelaporan serta Kepaniteraan Perdata yang terintegrasi.

Aplikasi tersebut dapat diakses di <http://komdanas.mahkamah.agung.go.id>



**n. Sistem Aplikasi Satker (SAS)**

Aplikasi satker yang merupakan penggabungan dari beberapa modul yaitu PPNPN, RPD Bulanan, RPD Harian, SPP, SPM, Silabi, Konfirmasi Setoran.



o. SAIBA

Aplikasi satker yang digunakan untuk pencatatan, dan pelaporan transaksi keuangan berbasis akrual.



**p. RKAKL DIPA**

Aplikasi satker yang digunakan dalam rangka penyusunan rencana kerja anggaran Kementerian Negara lembaga dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.



**q. SIMAK BMN**

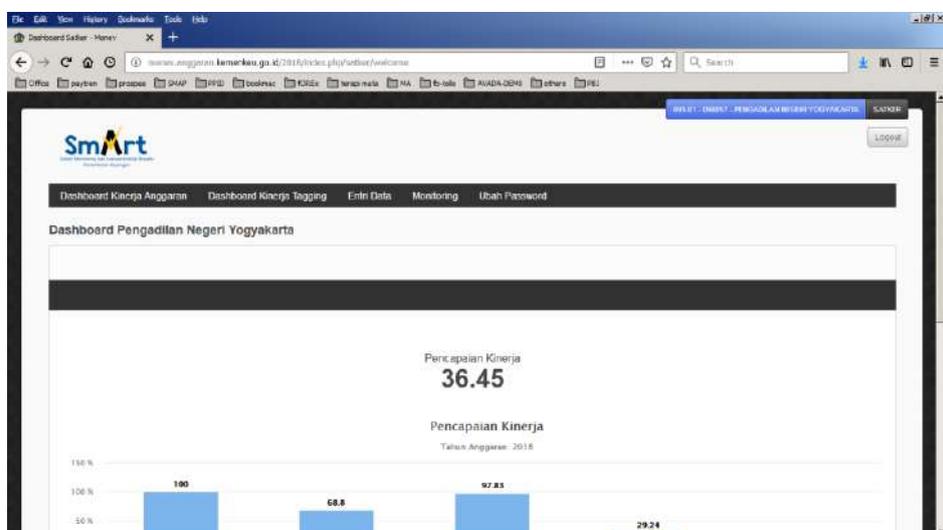
Aplikasi SIMAK-BMN (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara) adalah aplikasi yang digunakan untuk mencatat dan mengorganisir barang milik negara, mulai dari pembelian, transfer masuk-keluar antar instansi, sampai penghapusan dan pemusnahan barang milik Negara.



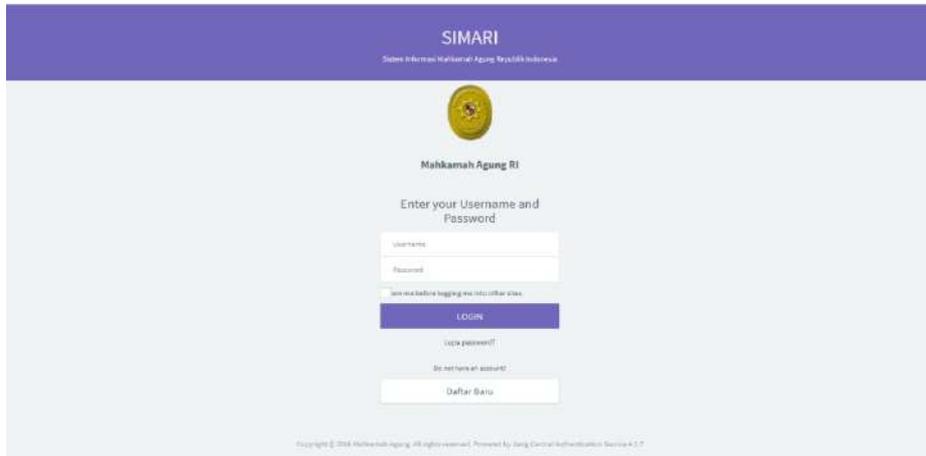
- r. **Aplikasi SIKEP dan aplikasi kepegawaian dari BKN**  
 Sistem Informasi Kepegawaian Mahkamah Agung RI.



- s. **SMART**  
 Sistem monitoring dan evaluasi kinerja terpadu atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran.



- t. **SIMARI**  
 System Informasi Mahkamah Agung RI yang terintegrasi, baik dari system informasi perkara, system informasi keuangan dsb.



**u. SIMPONI**

System informasi penerimaan negara bukan pajak secara on line.



**v. OMSPAN**

Aplikasi yang digunakan dalam rangka memantau transaksi dalam system perbendaharaan dan anggaran Negara (SPAN) yang menyajikan informasi sesuai kebutuhan / reporting.

No	Nomor SP2D	Tanggal Selesai SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SP2D	Nomor Invoice	Tanggal Invoice	Jenis SPAM	Jenis SP2D	Deskripsi	Cek Detail Akun	Data SP2D (PBB)
1	170301701003566	04-01-2018	31-12-2017	0	001397/098057/2017	31-12-2017	GTUP NB-EL	LAINNYA	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Modal Sebagai Pengesahan Atas Pertanggungjawaban TUP Tahun Anggaran 2017 sesuai SPP No. 00139 tanggal 31-12-2017	Cek Akun	<input type="checkbox"/>
2	170301701003565	04-01-2018	31-12-2017	0	001387/098057/2017	31-12-2017	GTUP NB-EL	LAINNYA	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang Sebagai Pengesahan Atas Pertanggungjawaban TUP Tahun Anggaran 2017 sesuai SPP No. 00138 tanggal 31-12-2017	Cek Akun	<input type="checkbox"/>
3	170301701003564	04-01-2018	31-12-2017	0	001377/098057/2017	31-12-2017	GTUP NB-EL	LAINNYA	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang Sebagai Pengesahan Atas Pertanggungjawaban TUP Tahun Anggaran 2017 sesuai SPP No. 00137 tanggal 31-12-2017	Cek Akun	<input type="checkbox"/>
4	170301701003567	04-01-2018	31-12-2017	0	001407/098057/2017	31-12-2017	GTUP NB-EL	LAINNYA	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang Sebagai Pengesahan Atas Pertanggungjawaban TUP Tahun Anggaran 2017 sesuai SPP No. 00140 tanggal 31-12-2017	Cek Akun	<input type="checkbox"/>

**w. MONEV**

Aplikasi yang digunakan dalam rangka monitoring dan evaluasi kinerja satker.



## BAB V

### PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta selalu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat adapun program-program yang telah dilaksanakan antara lain:

#### a. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

Dalam upaya meningkatkan pelayanan publik, Pengadilan Negeri Yogyakarta melakukan berbagai upaya demi mewujudkan visi badan peradilan yang agung. Salah satunya adalah mengikuti program Akreditasi Penjaminan Mutu Badan peradilan Umum. Akreditasi Penjaminan Mutu yang dibentuk Ditjen Badilum ini dimaksudkan untuk menjawab tantangan dan tuntutan masyarakat pada saat ini dan untuk mewujudkan Performa/Kinerja Peradilan Indonesia yang Unggul (Indonesian Court Performance Excellent/ICPE).

Adapun kriteria penilaian yang digunakan meliputi tujuh area yaitu: 1) Kepemimpinan (leadership); 2) Perencanaan Strategis (strategic planning); 3) Fokus Pelanggan (customer focus); 4) Sistem Dokumentasi (document system); 5) Manajemen Sumber Daya (resource management); 6) Manajemen Proses (process management); dan 7) Hasil Kinerja (performance results).

Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tahun 2016 mendapatkan nilai A (Excellent) sesuai dengan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum Nomor : TAPM.007/QMR/SERTIFIKAT/09/2016

Sertifikat Akreditasi Penjamin Mutu Badan Peradilan Umum ini dilakukan penilaian kembali setiap 6 (enam) bulan selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 29 Agustus 2016 sampai dengan 29 Agustus 2019 dengan rencana audit surveillance pada :

Bulan Februari Tahun 2017

Bulan Agustus Tahun 2017

Bulan Februari Tahun 2018

Bulan Agustus Tahun 2018

Bulan Februari Tahun 2019

Bulan Agustus Tahun 2019



Sertifikat Akreditasi Penjamin Mutu Badan Peradilan Umum

Pada Tanggal 15 Maret 2019, Tim Asesmen Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum melakukan assesmen di Pengadilan Negeri Yogyakarta, dan hasil nilai 702 point, sesuai dengan surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 1574/DJU/SK/OT.01.3/7/2019

b. **REFORMASI BIROKRASI**

Reformasi Birokrasi adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business proses) dan sumber daya manusia (aparatur).

Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA mengimplementasikan program Reformasi Birokrasi dan telah dilakukan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada hari Kamis tanggal 16 bulan Mei tahun 2018 yang telah di Asesor oleh Tim Reformasi dari Mahkamah Agung RI dengan Capaian **85,12** ( Delapan Puluh lima Koma Dua Belas) dengan nilai yang sangat baik.

c. **ZONA INTEGRITAS**

Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional, sebagaimana tercermin dalam tiga sasaran hasil utama program Reformasi Birokrasi yaitu (1) Birokrasi yang Bersih dari KKN dan Akuntabel, (2) Birokrasi yang Efektif dan Efisien, (3) Birokrasi yang memiliki Pelayanan Publik Berkualitas. Dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan.

Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka instansi pemerintah perlu untuk membangun *pilot project* pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit-unit kerja lainnya. Untuk itu, perlu secara konkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan Zona Integritas. Pengadilan Negeri Yogyakarta merupakan salah satu *pilot project* pelaksanaan reformasi birokrasi tersebut.

Pengadilan Negeri Yogyakarta mempunyai **komitmen** untuk mewujudkan **WBK/WBBM** melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam **hal pencegahan korupsi** dan **peningkatan kualitas pelayanan publik**.

Pengadilan Negeri Yogyakarta membangun dan mengimplementasikan program reformasi birokrasi secara baik sehingga mampu menumbuh-kembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja, dan budaya birokrasi yang melayani publik secara baik. Pada tahun 2018 Pengadilan Negeri Yogyakarta belum berkesempatan untuk mendapatkan predikat WBK / WBBM. Namun, tidak berhenti disini, pembangunan dan pemeliharaan Zona Integritas tetap kami lanjutkan pada tahun-tahun berikutnya.

#### **d. EVALUASI PELAYANAN PUBLIK**

Pada tahun 2019, Pengadilan Negeri Yogyakarta mendapat kesempatan untuk menjadi satker uji petik terhadap Evaluasi Pelayanan Publik. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melakukan evaluasi pelayanan publik terhadap unit kerja pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009.

Tujuan Evaluasi dilakukan agar terjadi perbaikan berkelanjutan. Selain itu, untuk menjamin terwujudnya harapan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang baik, berdasarkan amanat UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik, Kementerian PAN RB melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik. Hal ini dilakukan untuk memberikan percontohan bagi unit penyelenggara pelayanan publik lainnya sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan memberi dampak bagi kesejahteraan masyarakat. Keenam aspek tersebut meliputi: Kebijakan pelayanan publik, Profesionalisme sumber daya manusia, Sarana dan prasarana, Sistem informasi pelayanan publik, Mekanisme konsultasi dan pengaduan, Inovasi pelayanan publik.

Indikator penilaian diperoleh dari persilangan antara aspek dan enam prinsip dalam melakukan evaluasi: Keadilan, partisipasi, akuntabilitas, transparansi, berdayaguna, dan aksesibilitas.

Pada aspek kebijakan pelayanan, penilaian akan melihat pada standar pelayanan, maklumat pelayanan, dan survei kepuasan masyarakat. "Standar pelayanan yang disusun harus melibatkan masyarakat dan dipublikasikan.

#### **e. SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (SMAP)**

Pada tahun 2019 Pengadilan Negeri Yogyakarta berkesempatan untuk mendapatkan Asistensi Teknis dalam Penerapan SNI ISO 37001 : 2016 Sistem Manajemen Anti Penyusunan (SMAP) dari Badan Pengawasan MA RI yang dibiayai oleh USAID CEGAH Empowering Indonesia's Community of Accountability. Program tersebut bertujuan untuk melakukan pencegahan korupsi pada Pengadilan Negeri melalui peningkatan akuntabilitas dengan implementasi SNI ISO 37001 di 7 (tujuh) Pengadilan Negeri terpilih termasuk di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Ruang lingkup kegiatan tersebut :

- Hasil *Gap Analysis* pemenuhan klausul ISO 37001
- Peningkatan pemahaman dan pengetahuan terkait implementasi ISO 37001
- Penyusunan template dokumen/kelengkapan sesuai framework ISO 37001
- Rencana kerja implementasi ISO 37001
- Rekomendasi untuk perbaikan berkelanjutan dalam rangka penerapan ISO 37001

#### f. POSBAKUM

Pos bantuan hukum adalah layanan yang dibentuk oleh setiap pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Pembentukan Posbakum Pengadilan dilakukan secara bertahap. Pengadilan menyediakan dan mengelola ruangan dan sarana/prasarana untuk Posbakum Pengadilan sesuai kemampuan dengan memperhatikan akses untuk penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak, dan orang lanjut usia. Pengadilan harus menyediakan akses bagi terdakwa yang sedang ditempatkan pada ruang tahanan Pengadilan untuk bisa mengakses layanan Posbakum Pengadilan.

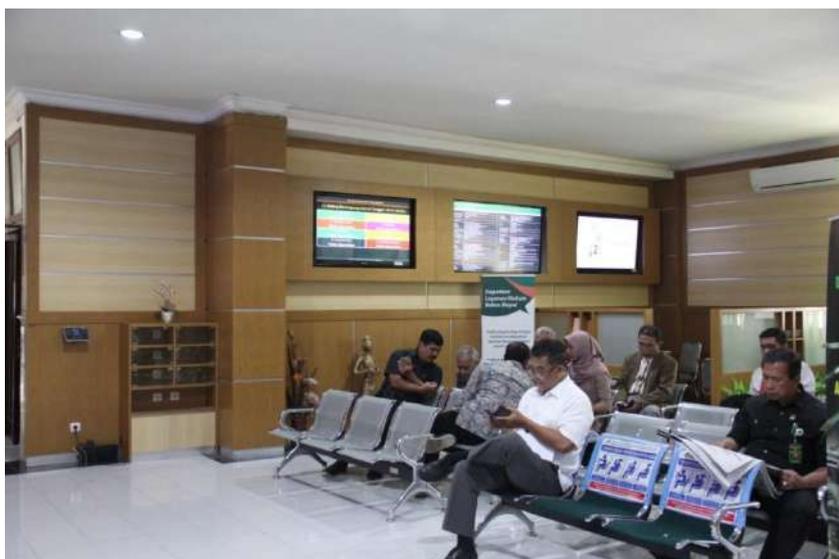
Pos Layanan Hukum diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Anggaran Posbakum Pada Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum tertuang dalam DIPA No.005.03.099128/2019.

Dalam tahun 2019, alokasi anggaran yang tersedia sejumlah Rp. 48.000.000,00 dan telah terealisasi Rp. 47.900.000,00 terdapat 70 kegiatan dengan jenis pelayanan advice, konsultasi, pembuatan dokumen hukum.

Pelayanan dari Posbakum adalah sebagai berikut:

- a. Melayani konsultasi hukum baik perkara pidana maupun perdata
  - b. Membantu pembuatan dokumen hukum
  - c. Memberikan bantuan hukum berupa pendampingan di sidang Pengadilan Negeri
  - d. Memberikan informasi mengenai prosedur bantuan hukum di Pengadilan Negeri
- Masyarakat tidak mampu secara ekonomi hanya perlu menyiapkan salah satu dokumen sebagai berikut:
- a. Surat Keterangan Tidak Mampu
  - b. Jamkesmas/KKM/Kartu Raskin/PKH
  - c. Dokumen lain yang terkait dengan keterangan tidak mampu.



#### **g. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)**

Untuk meningkatkan pelayanan yang prima, Pengadilan Negeri Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas I A telah menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyatukan pelayanan yang tersebar di beberapa kepaniteraan disatukan dalam satu pintu dan satu tempat mulai dari proses permohonan /pelimpahan perkara sampai terbitnya dokumen /selesaiannya proses (ONE STOP SERVICE). Pelayanan dilaksanakan dalam satu meja pelayanan baik itu untuk pelayanan teknis perkara maupun pelayanan umum. Wujud keseriusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan jajaran Pengadilan di bawahnya terhadap penerapan PTSP tersebut dilakukan dengan dikeluarkannya Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri.

PTSP tersebut dilakukan dengan memberikan pelayanan yang terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu. Penyelenggaraan PTSP ini senantiasa dilaksanakan dengan prinsip-prinsip dasar berupa keterpaduan, efektif, efisien, ekonomis, koordinasi, akuntabilitas, dan aksesibilitas. Ruang lingkup PTSP di Pengadilan Tinggi Yogyakarta ini meliputi seluruh pelayanan administrasi yang menjadi lingkup kompetensi/kewenangannya sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan dan peraturan perundangan lainnya yang berlaku

Penerapan PTSP sendiri tidak lain memiliki tujuan untuk: 1) Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, 2) Memberikan pelayanan yang prima, akuntabel, dan anti korupsi, kolusi, nepotisme. Selain itu, aspek penting dilaksanakannya program PTSP ini merupakan wujud dari pelayanan publik yang prima dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan atau kebutuhan-kebutuhan yang diselenggarakan oleh lembaga Pengadilan terhadap seluruh masyarakat yang mencari keadilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

PTSP merupakan salah satu program dalam rangka peningkatan pelayanan public, memangkas birokrasi pelayanan dan sebagai upaya mencapai good governance/kepemerintahan yang baik.

Jenis-jenis pelayanan :

Pelayanan Kepaniteraan Pidana

Pelayanan Kepaniteraan Perdata

Pelayanan Kepaniteraan Hukum

Pelayanan Surat Masuk (Bagian Umum)

Pelayanan Kepaniteraan PHI

## Pelayanan Kepaniteraan Tipikor

Untuk mendukung terselenggaranya Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA telah menerapkan aplikasi PTSP dari Dirjen Badilum, E-Skum, Kios-K SIPP, Antrian Sidang Elektronik, Antrian PTSP, Aplikasi IKM serta media informasi dan sosialisasi.



No	Jenis Layanan	Jumlah
1.	Surat Masuk	
2.	Surat Keluar	
3.	Surat Keterangan	
4.	Surat Kuasa	
5.	Izin Sita Pidana	
6.	Izin Geledah Pidana	
7.	Izin Besuk Pidana	
8.	Izin Sita Tipikor	
9.	Izin Geledah Tipikor	
10.	Izin Besuk Tipikor	
11.	Pendaftaran CV	
12.	Perubahan CV	
13.	Pembubaran CV	
14.	Warmarcking	
15.	Posbakum	
16.	Penelitian	
17.	Izin Perjanjian Kawin	
18.	Permohonan Informasi	

## I. INOVASI & KREATIVITAS PELAYANAN

### A. INOVASI PROSES

#### 1. PERUBAHAN DARI PELAYANAN SATU ATAP MENJADI PELAYANAN SATU PINTU

Untuk meningkatkan pelayanan yang prima, Pengadilan Negeri Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas I A telah menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyatukan pelayanan yang tersebar di beberapa kepaniteraan disatukan dalam satu pintu dan satu tempat mulai dari proses permohonan /pelimpahan perkara sampai terbitnya dokumen /selesaiannya proses (ONE STOP SERVICE). Pelayanan dilaksanakan dalam satu meja pelayanan baik itu untuk pelayanan teknis perkara maupun pelayanan umum. Wujud keseriusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan jajaran Pengadilan di bawahnya terhadap penerapan PTSP tersebut dilakukan dengan dikeluarkannya Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri.

PTSP tersebut dilakukan dengan memberikan pelayanan yang terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu. Penyelenggaraan PTSP ini senantiasa dilaksanakan dengan prinsip-prinsip dasar berupa keterpaduan, efektif, efisien, ekonomis, koordinasi, akuntabilitas, dan aksesibilitas. Ruang lingkup PTSP di Pengadilan Tinggi Yogyakarta ini meliputi seluruh pelayanan administrasi yang menjadi lingkup kompetensi/kewenangannya sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan dan peraturan perundangan lainnya yang berlaku

Penerapan PTSP sendiri tidak lain memiliki tujuan untuk: 1) Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, 2) Memberikan pelayanan yang prima, akuntabel, dan anti korupsi, kolusi, nepotisme. Selain itu, aspek penting dilaksanakannya program PTSP ini merupakan wujud dari pelayanan publik yang prima dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan atau kebutuhan-kebutuhan yang diselenggarakan oleh lembaga Pengadilan terhadap seluruh masyarakat yang mencari keadilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

PTSP merupakan salah satu program dalam rangka peningkatan pelayanan public, memangkas birokrasi pelayanan dan sebagai upaya mencapai good governance/kepemerintahan yang baik.

Jenis-jenis pelayanan :

- Pelayanan Kepaniteraan Pidana
- Pelayanan Kepaniteraan Perdata

- Pelayanan Kepaniteraan Hukum
- Pelayanan Surat Masuk (Bagian Umum)
- Pelayanan Kepaniteraan PHI
- Pelayanan Kepaniteraan Tipikor

Untuk mendukung terselenggaranya Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA telah menerapkan aplikasi PTSP dari Dirjen Badilum, E-Skum, Kios-K SIPP, Antrian Sidang Elektronik, Antrian PTSP, Aplikasi IKM serta media informasi dan sosialisasi.



## 2. PEMBENAHAN RUANGAN MENJADI LEBIH TRANSPARAN NAMUN STERIL

Pemisahan ruang pelayanan administrasi (PTSP) dan ruang pelayanan persidangan, dimana telah disediakan ruang tunggu masing-masing sesuai dengan jenis layanannya.

Pengunjung sudah tidak bisa masuk ke ruangan masing-masing.





### 3. SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (SMAP)

Implementasi SNI ISO 37001 : 2016 telah dilakukan secara bertahap yang dimulai dengan penetapan Inpres No.10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, yang diikuti dengan adopsi ISO 37001 : 2016 menjadi SNI ISO 37001 : 2016 melalui Keputusan Kepala Badan Standarisasi Nasional No.248/KEP/BSN/11/2016 pada bulan November 2016. SNI ISO 37001 dirancang bagi organisasi untuk menaati peraturan perundang-undangan serta memiliki kemampuan untuk mencegah (*prevent*), mendeteksi (*detect*), dan menangani (*respond*) terjadinya tindak pidana suap dengan berdasar pada 6 prinsip yaitu prosedur yang proporsional, komitmen pimpinan, manajemen risiko, uji kelayakan (*due diligence*), komunikasi yang efektif, serta monitoring dan review/evaluasi. Penerapan keenam prinsip tersebut dilakukan dalam sebuah proses yang disebut PDCA yaitu *Plan*, *Do*, *Check*, dan *Act*. SMAP mendasarkan pada 44 klausul yang menjadi kriteria SMAP yang mana dalam penerapannya di Pengadilan Negeri hanya dilakukan pada 43 klausul karena 1 klausul yaitu adanya organ lain di bawah Pengadilan Negeri tidak diterapkan dalam penilaian.

Pada tahapan penerapan SNI ISO 37001 dilakukan persiapan yang meliputi training dan gap analysis, pengembangan sistem yang meliputi pengembangan kebijakan dan pengembangan dokumentasi, implementasi yang meliputi sosialisasi dan implementasi sistem, review sistem yang meliputi audit internal, tinjauan manajemen, dan persiapan sertifikasi, serta Sertifikasi yang meliputi pemilihan lembaga sertifikasi, pelaksanaan audit, perbaikan hasil audit, dan keputusan sertifikasi. Pengadilan negeri yang diajukan

sebagai *pilot project* saat itu diminta untuk melakukan *bribery assement* terhadap titik-titik rawan suap serta membuat program kerja untuk mengawasi titik-titik rawan suap tersebut. Dalam penerapannya, sistem yang telah ada dalam rangka melakukan pencegahan, pendeteksian, dan penindakan atas perilaku suap disinergikan dalam rangka pengendalian suap dan gratifikasi serta penanganan atas pelanggaran yang terjadi. Terhadap sistem yang telah terbangun dan mendapatkan akreditasi maka akan dilakukan *surveillance* pada setiap 1 tahun dan jika ditemukan pelanggaran maka sertifikat SNI ISO 37001 : 2016 bisa dicabut.



#### 4. PENGADILAN AKSESIBEL MENUJU PENGADILAN INKLUSIF

- ✓ Penerapan pengadilan inklusif, yaitu layanan bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.
- ✓ Menjalin kerjasama MoU dengan pihak SADPA dalam rangka pendampingan disabilitas berhadapan hukum di dalam maupun di luar pengadilan dengan memberikan pendampingan psikososial dan proses pemulihan.

- ✓ Menjalin kerjasama dengan Pihak Pemerintah Kota Yogyakarta dengan bantuan hukum secara cuma-cuma untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan anak yang berhadapan hukum.
- ✓ Menjalin Kerjasama dengan LSM Rifka Annisa berupa pendampingan psikososial dan atau bimbingan konseling terhadap perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum

#### **LANGKAH-LANGKAH YANG SUDAH DIAMBIL :**

- ✓ Memberikan sosialisasi kepada para Hakim, Pegawai dan seluruh jajaran untuk dapat merubah *mindset* bahwa dalam pelayanan dan penanganan perempuan dan anak penyandang disabilitas harus didasarkan pada dasar hak asasi (*right based*) bukan atas dasar kasihan (*charity based*).
- ✓ Merubah perspektif bahwa penyandang difabel bukan lagi orang yang tidak dapat melakukan sesuatu seperti orang normal lainnya, melainkan orang yang dapat melakukan sesuatu dengan **kemampuan yang berbeda**.
- ✓ Sosialisasi kepada hakim dan pegawai mengenai pedoman mengadili perkara perempuan dan anak penyandang disabilitas.
- ✓ Memberikan sarana-prasarana yang akses dan ramah terhadap penyandang disabilitas.
- ✓ Mengidentifikasi adanya perlakuan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas.
- ✓ Perlakuan yang sama dalam system peradilan.
- ✓ Mengupayakan dan mengakomodasi keterangan penyandang difabel (tuna rungu) dengan menyediakan penerjemah tuna rungu

#### **SARANA – PRASARANA**

- ✓ Desk Pelayanan PTSP yang dapat diakses dan dijangkau penyandang disabilitas.
- ✓ Form disabilitas Pelayanan PTSP untuk pengguna layanan, sehingga dapat diketahui sejak awal kebutuhan alat bantu dan perlakuan apa yang harus diterapkan
- ✓ Posisi prioritas untuk penyandang disabilitas di persidangan
- ✓ Priority Seat yang dapat diakses dan dijangkau penyandang disabilitas.
- ✓ Kursi Roda dan Tongkat di lobby PTSP / Drop In Gedung
- ✓ Toilet Khusus dapat diakses dan dijangkau penyandang disabilitas.
- ✓ Jalur akses masuk ke gedung dapat diakses dan dijangkau penyandang disabilitas
- ✓ Video / audio visual untuk sosialisasi yang diterjemahkan dengan bahasa isyarat

- ✓ Situs Pengadilan Negeri Yogyakarta memiliki fitur aksesibilitas sesuai WCAG 2.0 seperti pengatur ukuran font, kontras warna, konversi teks ke suara untuk membantu para pencari keadilan khusus difabel dalam mengambil informasi di situs Pengadilan. Fitur AccessKey navigasi keyboard juga ditanamkan di situs ini bagi difabel mandiri
- ✓ SOP Penanganan Difabel
- ✓ *Sosialisasi* Penanganan Hukum Yang Ramah Dan Akses Bagi Perempuan Dan Anak Disabilitas Yang Berhadapan Dengan Hukum dengan Hakim dan pegawai Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 14 Oktober 2019
- ✓ Konsultasi dan Pengumpulan Data dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan tanggal 17 Oktober 2019 di Pengadilan Negeri Yogyakarta oleh utusan Debuti Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian Sekretariat Negara RI



**ETIKA BERINTERAKSI DENGAN Penyandang Disabilitas Sensorik Rungu Wicara**

Penyandang disabilitas sensorik rungu wicara mengacu pada gangguan fungsi indera pendengaran dan gangguan bicara sehingga biasanya menggunakan gerakan syarat atau tulisan dalam berkomunikasi  
Sumber: UU No 8 Tahun 2016

**Etika Berinteraksi**

- Cara menyapa: Sentuh, Salam, Sapa
- Berbicara harus dengan kontak mata dan berhadapan wajah kepada penyandang disabilitas rungu/ wicara, tidak mengarahkan wajah kita kepada penerjemah
- Gerakan bibir harus jelas
- Menggunakan mimik/pestar/ ekspresi/Bahasa tubuh
- Menyediakan alat tulis
- Menghindari menggunakan masker dan benda lain yang menutupi atau menghalangi bibir
- Menyediakan interpreter apabila diperlukan

PENGADILAN NEGERI, KANTOR HAKIM INDUSTRIAL DAN TUNJANG PERUSAHA KEMERDEKAAN YOGYAKARTA RELAS IA

**ETIKA BERINTERAKSI DENGAN Penyandang Disabilitas Mental**

Penyandang Disabilitas mental mengacu pada terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku akibat gangguan fungsi psikologis atau adanya hambatan dalam interaksi sosial  
Sumber: UU No 8 Tahun 2016

**Etika Berinteraksi**

- Menanyakan hal-hal apa saja yang perlu diketahui oleh kita sebagai pendamping, seperti waktu untuk istirahat, waktu untuk minum obat, dan lain sebagainya
- Berbicaralah langsung kepada penyandang disabilitas mental, tidak melalui pendamping
- Gunakan kata-kata yang sederhana
- Gunakan petunjuk-petunjuk pembantu, seperti gambar yang berlaku secara umum

PENGADILAN NEGERI, KANTOR HAKIM INDUSTRIAL DAN TUNJANG PERUSAHA KEMERDEKAAN YOGYAKARTA RELAS IA



**5. KERJASAMA PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK BERHADAPAN HUKUM DENGAN DINAS PMPPA (PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA)**

- ✓ Kerjasama penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan anak berhadapan hukum.
- ✓ Mou antara Pemkot Yogyakarta, Peradi Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Yogyakarta yang ditandatangani tanggal 29 Maret 2018.

- ✓ Pengadilan Negeri Yogyakarta mendukung terwujudnya Yogyakarta menjadi Kota Layak Anak.
- ✓ Pengadilan Negeri Yogyakarta telah mempersiapkan sejumlah prasarana yang disiapkan seperti ruang sidang anak, ruang tahanan ramah anak, ruang anak tidak ditahan, ruang untuk anak sebagai korban, ruang tahanan untuk perempuan, ruang teleconference, ruang tunggu Bapas/Peksos, Pojok Baca, Klinik Kesehatan, Ruang Pengasuhan Anak dan lain-lain.
- ✓ Pemkot Yogyakarta memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan anak yang berhadapan hukum di Kota Yogyakarta.

#### **6. KERJASAMA PENDAMPINGAN PSIKOSOSIAL TERHADAP ANAK DAN PEREMPUAN YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DENGAN LSM RIFKA ANNISA**

- ✓ Kerjasama Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan LSM Rifka Annisa tertanggal 13 Maret 2018.
- ✓ Pendampingan psikologi anak yang berhadapan dengan hukum.
- ✓ Pendampingan psikososial dan atau bimbingan konseling terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum
- ✓ Pemberian layanan konseling laki-laki dan perempuan sebagai bagian dari upaya menghentikan kekerasan terhadap perempuan dan anak berbasis Gender.

#### **7. PENANDATANGANAN MOU PENANGANAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN KEPADA PEREMPUAN DAN ANAK PENYANDANG DISABILITAS YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM**

- Kerjasama Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan LSM SAPDA tertanggal 12 Juli 2018.
- Pendampingan psikososial dan proses pemulihan perempuan dan anak disabilitas yang berhadapan dengan hukum.
- Asistensi dan dukungan kepada Pengadilan Negeri Yogyakarta menjadi pengadilan yang aksesibel terhadap kaum disabilitas
- Peningkatan sarana prasarana untuk kaum disabilitas.

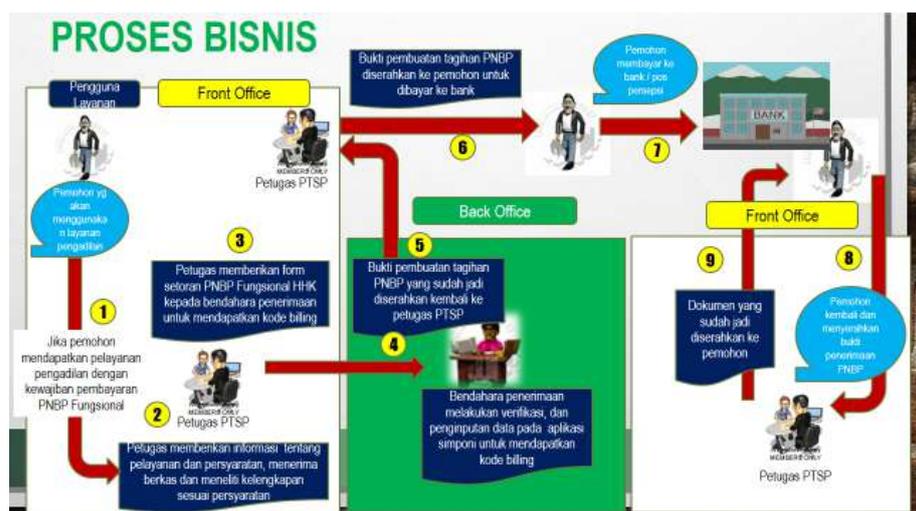
#### **8. PENANDATANGANAN MOU PENYULUHAN HUKUM MELALUI RADIO (ON-AIR)**

- ✓ Kerjasama dengan Radio Retjo Buntung dalam penyuluhan hukum.

- ✓ Kesepakatan bersama ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat Kota Yogyakarta untuk memperoleh informasi masalah hukum dengan memberikan penyuluhan hukum melalui siaran radio.
- ✓ Kesepakatan bersama ini bermaksud untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat untuk taat dan sadar kepada hukum yang berlaku di Indonesia serta sebagai sarana untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh pengetahuan dibidang hukum.
- ✓ Untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh pengetahuan dibidang hukum, Pengadilan Negeri Yogyakarta menyediakan narasumber untuk memberikan penyuluhan di bidang hukum.
- ✓ Pihak Radio Retjo Buntung memberikan waktu jam siaran secara langsung (on air) dengan durasi 1 (satu) jam setiap hari Kamis ke-1 pukul 09.00-10.00 WIB, serta akan dipertimbangkan untuk melakukan siaran satu bulan lebih dari satu kali dengan melihat situasi dan kondisi

## 9. PEMBAYARAN PNBP FUNGSIONAL KERJA SAMA DENGAN PT POS INDONESIA

- Kerjasama dalam penerimaan layanan PNBP Fungsional pada Pengadilan Negeri Yogyakarta.
- Kesepakatan bersama ini bertujuan untuk mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam pembayaran PNBP Fungsional serta demi terciptanya tertib administrasi pengelolaan PNBP Fungsional yang efektif dan efisien pada Pengadilan Negeri Yogyakarta;
- Kesepakatan bersama ini ditujukan dalam rangka transparansi dan keterbukaan informasi terkait pengelolaan PNBP yang ada di Pengadilan Negeri Yogyakarta;
- Pihak PT. Pos Indonesia memberikan dukungan dengan menempatkan pegawainya dan sarana yang diperlukan untuk memenuhi penerimaan PNBP Fungsional di kantor Pengadilan Negeri Yogyakarta





### **BENTUK KERJASAMA LAIN DENGAN KANTOR POS :**

- ✓ **Nazegelen**, pematereian barang bukti, yang selama ini dilakukan di Kantor Pos Besar. Hal itu sangat memudahkan dan mempercepat para pihak dalam pelayanan.
- ✓ Pengiriman Wesel Delegasi Keluar, dimana sangat membantu sekali pihak koordinator delegasi dan JSP dalam mengurangi kegiatan keluar kantor.
- ✓ Mempercepat pengiriman surat keluar dan mengurangi korupsi waktu petugas kurir.

### **10. KERJASAMA PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DI KOTA YOGYAKARTA**

- Sebagai landasan koordinasi PARA PIHAK dalam rangka peningkatan pelayanan publik di Kota Yogyakarta.
- Kesepakatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya para pihak dalam meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan ketaatan masyarakat terhadap hukum.
- Mou antara Pemkot Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Yogyakarta yang ditandatangani tanggal 6 September 2018.
- Ruang lingkup kerjasama ini meliputi kerjasama di bidang hukum, integrasi data dan pelayanan terpadu.
- Kerjasama ini merupakan dasar untuk dijadikan sebagai dasar hukum untuk perjanjian kerjasama dengan SKPD dilingkungan Pemkot Yogyakarta.

### **11. KERJASAMA PENINGKATAN PELAYANAN TERPADU IDENTITAS HUKUM BAGI MASYARAKAT KOTA YOGYAKARTA.**

- Kesepakatan ini bermaksud untuk meningkatkan efektifitas, koordinasi dan kerjasama para pihak dalam pelayanan kepemilikan status hukum, kepemilikan

hukum bagi masyarakat kota Yogyakarta. Kesepakatan ini bertujuan untuk membantu masyarakat memperoleh status hukum dan identitas hukum secara mudah, cepat dan biaya ringan. Memudahkan masyarakat dalam memenuhi identitas hukum dalam melakukan perbuatan hukum di masyarakat dengan pelaksanaan pelayanan terpadu. Untuk mensinergikan program peran masing-masing pihak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam mewujudkan status hukum dan identitas hukum bagi masyarakat kota Yogyakarta. Memudahkan pelaporan data perkara yang diputuskan / ditetapkan oleh pengadilan Negeri Yogyakarta ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta secara cepat dan akurat setelah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Yogyakarta yang ditandatangani tanggal 25 Oktober 2018.

## **12. KERJASAMA PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN HUKUM DENGAN UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

- ✓ Perjanjian Kerjasama antara Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Pengadilan Negeri Yogyakarta yang ditandatangani tanggal 27 September 2018.
- ✓ Kerjasama ini bertujuan untuk memberikan dan meningkatkan kualitas pendidikan dalam bidang kemahiran hukum kepada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, khususnya dalam pengembangan dan pelaksanaan Mata Kuliah Pemagangan.
- ✓ Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokok masing-masing pihak, secara bersama-sama melaksanakan pendidikan atau perkuliahan Mata Kuliah Pemagangan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di kedua belah pihak baik di tempat Pihak Kesatu maupun di tempat Pihak Kedua.

## **13. KERJASAMA SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU (SPPT)**

- Perjanjian Kerjasama antara Pengadilan Negeri Yogyakarta, Kejaksaan Negeri Yogyakarta, Kepolisian Resor Kota Yogyakarta, Rumah Tahanan Klas II Yogyakarta.
- Maksud dan tujuan kerjasama tersebut adalah :
  - Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia para pihak dalam rangka pemanfaatan teknologi informasi guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
  - Optimalisasi fungsi koordinasi antara Pengadilan Negeri Yogyakarta, Kejaksaan Negeri Yogyakarta, Kepolisian Resor Kota Yogyakarta dan Rumah Tahanan Klas II Yogyakarta
  - Menciptakan sistem peradilan pidana terpadu dalam memanfaatkan teknologi.

- Mewujudkan masyarakat yang taat akan hukum yang berlaku.
  - Ruang lingkup Kesepakatan Bersama meliputi kegiatan penyuluhan hukum, kerjasama di bidang hukum, pelayanan sidang terpadu dan sistem peradilan pidana terpadu agar masyarakat taat terhadap hukum yang berlaku.
14. PERJANJIAN KERJASAMA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA DENGAN FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN (UAD) TENTANG PROGRAM KULIAH LAPANGAN (FIELD STUDY) DAN PENELITIAN MAHASISWA PADA LAYANAN PENGASUHAN ANAK DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA
  15. PERJANJIAN KERJASAMA PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL) DAN TUGAS AKHIR (TA) BAGI MAHASISWA AKADEMI AKUNTANSI YKPN YOGYAKARTA DENGAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA
  16. KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA DENGAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN TENTANG KERJASAMA KEGIATAN DI BIDANG PENDIDIKAN.
  17. KERJASAMA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA DENGAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TENTANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT MAHASISWA.
  18. PERJANJIAN KERJASAMA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA DENGAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TENTANG PELAKSANAAN MONITORING PERSIDANGAN.
  19. PERJANJIAN KERJASAMA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA DENGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DAN DEWAN PIMPINAN CABANG PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN, ANAK DAN PENYANDANG DISABILITAS YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

## **B. INOVASI PELAYANAN**

### **1. MEMBUAT STANDAR PELAYANAN PUBLIK**

Berbicara tentang pelayanan publik, sesuai dengan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dinyatakan bahwa Pelayanan Publik merupakan kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan penyelenggara pelayanan publik. Berdasarkan pengertian tersebut, kegiatan pelayanan publik telah diatur pemenuhannya berdasarkan regulasi yang dibuat oleh

pemerintah dengan tujuan utamanya untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kesejahteraan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang pelayanan Publik yang memiliki 4 tujuan, yakni memberikan batasan dan hubungan yang jelas terkait hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan setiap pihak dalam penyelenggaraan pelayanan publik, mewujudkan pelayanan publik yang berasaskan pemerintahan dan korporasi yang baik, terpenuhinya pelayanan publik yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam pelayanan publik. Lebih rinci lagi, Undang-Undang tersebut mengatur hak dan kewajiban baik penyelenggara maupun pengguna pelayanan publik. Setidaknya ada 12 kewajiban penyelenggara dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan.

Standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan teratur. Adanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik tentunya memberikan arahan kepada seluruh penyelenggara pelayanan baik penyelenggara negara, BUMN, BUMD, BHMN hingga swasta maupun persorangan penyelenggaraan pelayanan yang terstandarisasi dengan memenuhi komponen standar pelayanan.

Setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban memenuhi 14 komponen standar pelayanan yang meliputi : 1) dasar hukum, peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan; 2) persyaratan, syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif; 3) sistem, mekanisme dan prosedur, tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan; 4) jangka waktu penyelesaian, jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan; 5) biaya/tarif, ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat; 6) produk pelayanan, hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan; 7) sarana, prasarana, dan/atau fasilitas, peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan, termasuk peralatan dan fasilitas bagi kelompok rentan; 8) kompetensi pelaksana, kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman; 9) pengawasan internal, pengendalian yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja atau atasan langsung pelaksana; 10) penanganan pengaduan, saran, dan masukan, tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjutnya; 11) jumlah pelaksana, tersedianya pelaksana sesuai dengan beban kerja; 12) jaminan pelayanan yang

memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan; 13) jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan risiko keragu-raguan; dan 14) evaluasi kinerja pelaksanaan, penilaian untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan sesuai standar pelayanan.

Saat ini Pengadilan Negeri Yogyakarta telah mempunyai standart pelayanan, namun sedang direview disesuaikan dengan pemenuhan 14 komponen tersebut dan disesuaikan dengan perkembangan regulasi yang ada.



## 2. COWORKING SPACE DAN MEDIA CENTER PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

Fasilitas ruang publik yang dapat dipergunakan untuk bekerja oleh mereka yang berkunjung ke pengadilan tersebut, dimana terdapat beberapa meja dan kursi layaknya di sebuah café. Fasilitas yang disediakan berupa stopkontak untuk mengisi daya listrik ke laptop maupun telepon genggam, free wifi. Di pojok kiri ruangan terdapat pajangan berbagai plakat yang diraih PN Yogyakarta terutama berkaitan dengan pencegahan korupsi dan gratifikasi. Sementara di sebelah kanannya terdapat kantin kejujuran / *honesty coffeeshop* dengan menu teh dan kopi lengkap dengan persediaan air panas, sehingga yang ingin bekerja sambil menikmati minuman hangat tinggal membeli dan menyeduhnya langsung di tempat.

Perkembangan peradilan yang mengarah kepada sistem peradilan elektronik. Meski telah disediakan pojok *e-court* (*e-court corner*), para advokat masih mungkin untuk berfikir menyelesaikan pekerjaannya terkait *e-court* di pengadilan.

Ruangan tersebut akan menjadi fasilitas lain untuk mendukung terlaksananya sistem peradilan elektronik dengan lebih baik. Jika *e-court corner* dimaksudkan untuk melayani pengguna terdaftar dan pengguna lain yang baru mendaftar, fasilitas ini justeru untuk selama proses persidangan secara elektronik.

### Ruangan Multifungsi

Ruangan tersebut bukan hanya untuk bekerja para mitra pengadilan, tetapi juga dimanfaatkan sebagai media center dan ruang pertemuan. Bilamana terdapat perkara-perkara yang menarik perhatian publik, bagian Humas Pengadilan akan mempersiapkan *press release* dan memberikan keterangan pers di ruangan tersebut. Hal tersebut akan terasa lebih baik ketimbang para awak media mendapatkan informasi di sembarang tempat atau dari sumber-sumber yang tidak jelas.

Dan jika ada mahasiswa yang melakukan penelitian atau membutuhkan penjelasan secara klasikal, ruangan tersebut dapat dimanfaatkan, karena Yogyakarta adalah kota pendidikan, banyak mahasiswa yang datang untuk observasi maupun penelitian.

**KAPAS-10  
CO-WORKING SPACE**  
Workspace for the Modern Professional

**MEDIA CENTER PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA**

**ITU APA SIH??**  
KAPAS-10 CO-WORKING SPACE merupakan co-working space yang dimiliki Pengadilan Negeri Yogyakarta yang dapat digunakan pengguna layanan profesional seperti Advokat / Penasehat Hukum, Aparat Kepolisian, Aparat Kejaksaan, Lapas / Rutan, Bapas, Para Pihak dan Mahasiswa sehingga selama menunggu pelayanan masih dapat bekerja.

**APA KEUNTUNGAN MENGGUNAKAN KAPAS-10 CO-WORKING SPACE**

- Menghindari useless time
- Bebas menyelesaikan project atau pekerjaan di co-working space
- Networking dengan komunitas penasehat hukum atau pengguna layanan
- Upgrade skill
- Ngopi santuyyy....
- Free Wifi

**SIAPA SAJA YANG BOLEH MENGGUNAKAN?**  
Jika kamu adalah pengguna layanan Pengadilan Negeri Yogyakarta, baik persidangan maupun PTSP, pas banget nihh, kamu bisa memanfaatkan Kapas-10 co-working space lhoo!!

**FASILITAS**

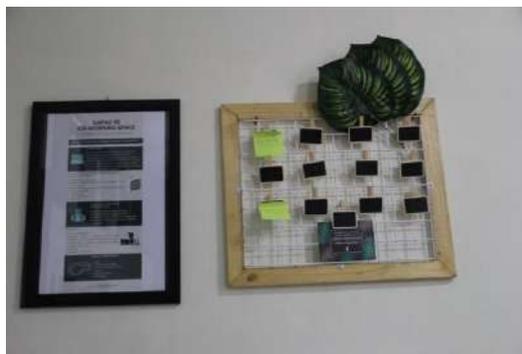
- Co-working Space
- Meeting Room : sebagai tempat temu partners / klien maupun sharing knowledge
- Media center : publikasi program Pengadilan Negeri Yogyakarta
- Free wifi
- Honesty Coffee Shop

**RULE / PERATURAN**

- Jujur
- Silent ponsel / gadget
- Tenang / berbicara pelan
- Sopan
- Jaga kebersihan
- Bersahabat

[www.pn-yogyakarta.go.id](http://www.pn-yogyakarta.go.id)

Infografis Co-working space



### **Media Saran & Masukan Untuk Peningkatan Pelayanan Publik**

Media saran dan masukan dibuat instagramable dan kekinian di coworking space disamping survey dan IKM yang telah dibuat digital, agar mengesankan unik.



**Honesty Coffee Shop**



**CO-WORKING SPACE**



**MEDIA CENTER UNTUK PERSS CONFERENCE**

### 3. PELAYANAN KESEHATAN GRATIS



- ✓ Pelayanan Kesehatan Gratis ini diberikan kepada semua pemangku kepentingan Pengadilan (terdakwa, saksi, para pihak yang berperkara, jaksa, polisi, hakim, advokat /aparat yang beraktivitas) pada Pengadilan Negeri Yogyakarta sehingga mendapatkan perhatian untuk mendukung kesehatan fisik maupun mental mereka.
- ✓ Pengadilan Negeri Yogyakarta bekerjasama dengan RSUD Kota Yogyakarta (MoU ditandatangani 12 Juni 2015)
- ✓ Sudah beroperasi sejak awal Mei 2015 dengan rata-rata pengunjung 15-20 orang perhari

Jadwal Klinik kesehatan yaitu: Psikiater/dokter jiwa setiap Kamis jam 11.00 – 13.00 WIB  
Dokter umum dan spesialis setiap Senin dan Rabu jam 11.00 – 13.00 WIB



- ✓ Masing-masing pojok baca akan dilengkapi 100 eksemplar buku yang setiap dua bulan sekali akan diganti. Buku-buku yang disediakan meliputi berbagai subjek seperti kesehatan, pengetahuan umum populer, buku-buku praktis, keagamaan serta fiksi.



## 6. RUANG MENYUSUI / LAKTASI



## 7. WARUNG KEJUJURAN

Sejak tahun 2016 Pengadilan Negeri Yogyakarta menerapkan warung kejujuran di lobby PTSP, semua karyawan ,pegawai, dan pengunjung membeli dan mengambil kembalian sendiri, tidak ada yang melayani. Warung kejujuran merupakan simbol Integritas Pengadilan Negeri Yogyakarta. Sejak dibuka, belum pernah mengalami

kerugian, hal tersebut mencerminkan bahwa Integritas di lingkungan Pengadilan Negeri Yogyakarta benar-benar diimplementasikan dan telah dijiwai.



## 8. Penguatan Anti Korupsi dan Anti Suap dengan Museum Gratifikasi

Museum Gratifikasi digunakan untuk menyimpan benda-benda gratifikasi dari UPG. Dimaksudkan untuk memberikan edukasi kepada pengunjung atau masyarakat agar tidak memberikan gratifikasi atau suap kepada aparat pengadilan.



## 9. Penguatan Anti Korupsi dan Anti Suap dengan Himbauan





## 10. PHOTOBOTH



Photoboth untuk masyarakat / pengguna layanan Pengadilan Negeri Yogyakarta telah disediakan meskipun sederhana dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, dan menampilkan pencapaian-pencapaian yang telah diraih Pengadilan Negeri Yogyakarta beserta piagam / komitmen pimpinan dan seluruh pegawai Pengadilan Negeri Yogyakarta

Photoboth dibuat dengan maksud agar mendekatkan pengadilan dengan masyarakat. Pengadilan tidak lagi menjadi tempat orang bermasalah, "ngeri" tetapi lebih hommyy.

## C. INOVASI SISTEM

Pembenahan dan Penyempurnaan Teknologi Informasi

### 1. ANTRIAN SIDANG

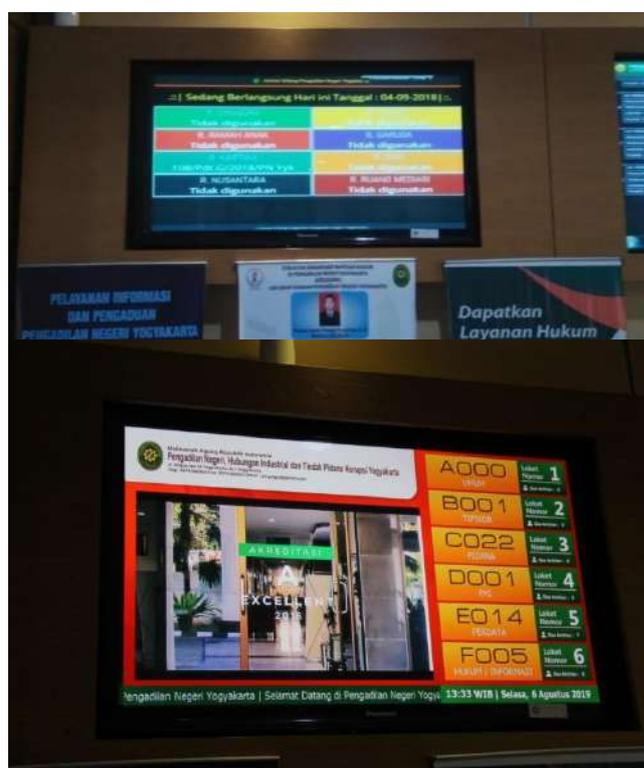


Antrian Sidang Pengadilan Negeri Yogyakarta adalah layanan kepada Pencari Keadilan dimana Para Pihak yang berperkara akan dipanggil dan disebut nama pihak untuk memasuki ruang sidang dengan sistem yang sudah terkoneksi dengan Aplikasi Absensi Pihak (Roll Sidang) di Meja Informasi dan Terkoneksi dengan data perkara di SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara).

Aplikasi ini berdasarkan kedatangan dan kelengkapan para pihak, yaitu dengan cara para pihak melaporkan kedatangan ke meja informasi. Para pihak yang sudah lengkap akan disidangkan terlebih dahulu, disamping itu masyarakat dapat mengetahui persidangan suatu perkara berkaitan dengan ruang sidang, status persidangan atau sudah selesai sidang.

Pemanggilan Pihak dapat dilakukan dengan menggunakan Personal Komputer, Laptop atau Handphone Android.

Dengan adanya aplikasi ini diharapkan adanya peningkatan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap layanan pengadilan khususnya Pengadilan Negeri Yogyakarta.



## 2. APLIKASI TRANSKRIP PERSIDANGAN

Aplikasi Transkrip Persidangan (ATP) adalah sebuah inovasi aplikasi peradilan yang dibuat untuk merubah proses administratif peradilan dari konvensional menjadi berbasis teknologi informasi.

Cara kerja ATP (Aplikasi Transkrip Persidangan) yaitu pengenalan suara pembicara dan dikonversi dalam bentuk text didalam komputer

Terdiri dari beberapa panel yang ditampilkan, dan pembicara dalam ruang sidang dapat berbicara bersamaan sekaligus.

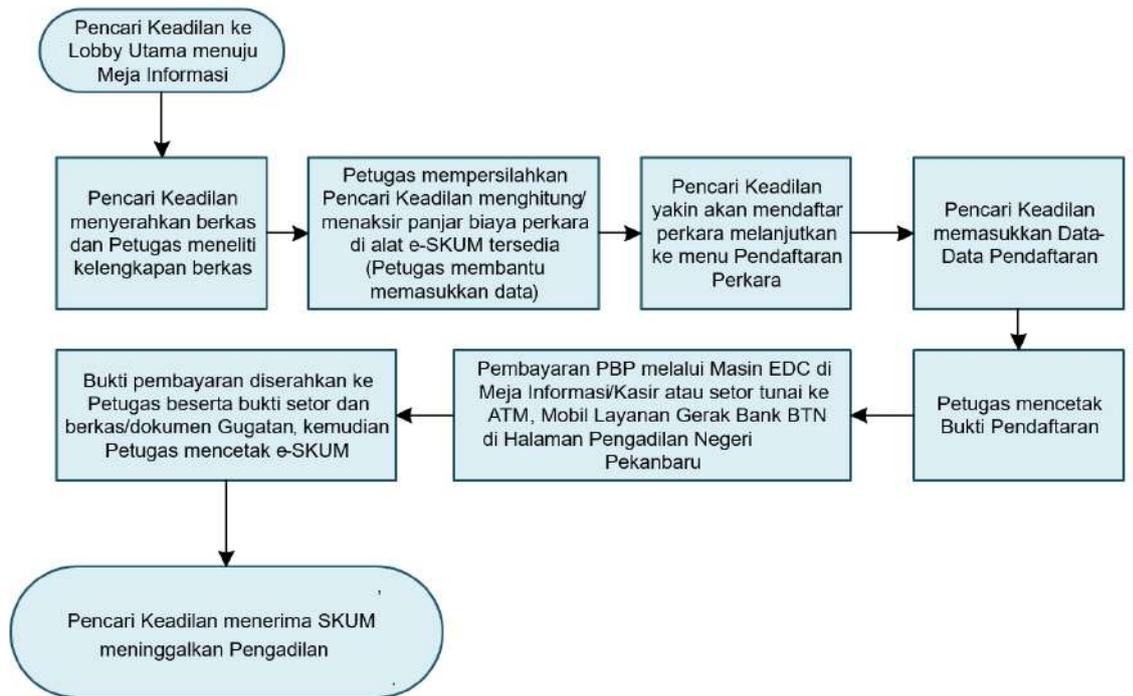


## 3. E-SKUM

e-SKUM adalah Sistem Aplikasi Menghitung Sendiri Panjar Biaya Perkara yang dilakukan oleh Para Pencari Keadilan di Loby Utama dengan menggunakan alat e-SKUM.

Maksud dan Tujuan dalam penerapan Sistem Aplikasi e-SKUM adalah untuk memberikan pelayanan terbaik serta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan tujuan akhir terciptanya peningkatan kualitas pelayanan publik di pengadilan agar pelayanan peradilan dapat terselenggara lebih cepat, sederhana dan berbiaya ringan.





#### 4. E-COURT & ERATERANG CORNER



#### 5. VOICE WARNING SYSTEM (SMAP)

**Voice Warning System SMAP (Sistem Manajemen Anti Penyuaan)**  
 Pengadilan Negeri, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau  
 1. Untuk menginformasikan kepada pencari keadilan (PKA) dan pencari keadilan (PKA) yang telah terdaftar di sistem SMAP (Sistem Manajemen Anti Penyuaan) bahwa telah terdaftar di sistem SMAP (Sistem Manajemen Anti Penyuaan) dan dapat menerima informasi melalui sistem SMAP (Sistem Manajemen Anti Penyuaan).

1. Untuk menginformasikan kepada pencari keadilan (PKA) dan pencari keadilan (PKA) yang telah terdaftar di sistem SMAP (Sistem Manajemen Anti Penyuaan) bahwa telah terdaftar di sistem SMAP (Sistem Manajemen Anti Penyuaan) dan dapat menerima informasi melalui sistem SMAP (Sistem Manajemen Anti Penyuaan).
2. Untuk menginformasikan kepada pencari keadilan (PKA) dan pencari keadilan (PKA) yang telah terdaftar di sistem SMAP (Sistem Manajemen Anti Penyuaan) bahwa telah terdaftar di sistem SMAP (Sistem Manajemen Anti Penyuaan) dan dapat menerima informasi melalui sistem SMAP (Sistem Manajemen Anti Penyuaan).
3. Untuk menginformasikan kepada pencari keadilan (PKA) dan pencari keadilan (PKA) yang telah terdaftar di sistem SMAP (Sistem Manajemen Anti Penyuaan) bahwa telah terdaftar di sistem SMAP (Sistem Manajemen Anti Penyuaan) dan dapat menerima informasi melalui sistem SMAP (Sistem Manajemen Anti Penyuaan).



Voice Warning System SMAP (Sistem Manajemen Anti Penyuaan) diumumkan 1 jam sekali secara rutin di hari kerja.

## 6. APLIKASI SURVEY IKM & IPK



Aplikasi survey IKM dan IPK

## **BAB IV**

### **PENGAWASAN**

#### **A. INTERNAL**

Dalam hal Pengawasan, Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta kelas IA berpedoman pada Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Di Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta kelas IA pelaksanaan pengawasan melekat telah dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta kelas IA, Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris. Untuk Hakim-Hakim pelaksanaan pengawasan melekat ada pada Ketua Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta kelas IA, sedangkan pada Kepaniteraan, pejabat struktural maupun tenaga fungsional lainnya dilakukan oleh Panitera untuk Kepaniteraan dan Sekretaris untuk Kesekretariatan.

Sedangkan untuk Pengawas bidang telah ditunjuk Hakim Pengawas Bidang. Hakim Pengawas Bidang ini membuat laporan pengawasan setiap bulan yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan melalui Wakil Ketua Pengadilan Negeri.

Untuk Pengawasan Keuangan sesuai dengan pedoman pengawasan telah dilakukan pemeriksaan atas pengelolaan APBN dan pemeriksaan atas laporan realisasi APBN dan Neraca.

Adapun selama Periode bulan Januari 2019 sampai dengan Desember 2019, di Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta kelas IA telah dilakukan Pengawasan dan Pembinaan oleh Tim:

1. Pemeriksaan Reguler dari Tim Pengawas Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang dilaksanakan pada tanggal 24 April 2019
2. Pemeriksaan Reguler oleh Tim Pengawas dari Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang dilaksanakan tanggal 26 Nopember 2019
3. Audit Internal oleh Tim Audit Internal tanggal 9 Februari 2019
4. Audit Internal oleh Tim Audit Internal tanggal 6 November 2019

#### **B. EVALUASI**

Pada umumnya pengawasan di Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta kelas IA telah berjalan dengan baik, karena Pengawasan melekat telah berjalan dan dilaksanakan oleh Pimpinan dan pejabat yang bertanggung jawab.

Untuk Pengawasan oleh Hakim Pengawas Bidang telah berjalan dengan baik, karena Pengawas Bidang telah menjalankan tugasnya untuk memberikan pengawasan dan arahan – arahan untuk perbaikan dalam pelaksanaan tugas selanjutnya membuat laporan kepada

Ketua Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta kelas IA setiap satu bulan sekali.

Selain Pengawasan Internal, terdapat evaluasi dari eksternal antara lain:

1. Surveillance Akreditasi Penjaminan Mutu oleh TAPM Badilum MA RI tanggal 15 Maret 2019 dengan hasil nilai 702 point.
2. Evaluasi Pelayanan Publik Oleh Tim Mahkamah Agung RI tanggal 4 September 2019.
3. Uji Petik Pelaksanaan Zona Integritas dari Kementrian PAN/RB dan MA RI tanggal 23 Juli 2019
4. Evaluasi Penilaian PTSP oleh Tim Penilai dari Badan Peradilan Umum tanggal 20 Agustus 2019.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

#### **A. KESIMPULAN :**

Berdasarkan hasil pelaksanaan keseluruhan program Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2019, maka dapat disimpulkan :

1. Secara umum seluruh program dan kegiatan telah dapat dilaksanakan dengan baik meskipun terdapat beberapa hambatan.
2. Koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan baik antara pegawai, pejabat struktural, pejabat teknis belum optimal sehingga masih banyak kekurangan baik dalam pengelolaan sarana prasarana, anggaran, penyelesaian perkara maupun pelayanan publik.
3. Program-program yang sudah ada telah dipelihara dan ditingkatkan dengan pengembangan program-program yang baru yang mendukung peningkatan pelayanan publik.
4. Konsistensi pelaksanaan kegiatan maupun program-program berdasarkan perencanaan, juklak, juknis maupun peraturan yang ada sangat bergantung pada SDM dan Anggaran.
5. Komitmen pimpinan dan komunikasi internal sangat berpengaruh terhadap suksesnya suatu program.

#### **B. REKOMENDASI :**

Menghadapi pelaksanaan program Tahun 2019, dan berangkat dari pelaksanaan kegiatan Tahun 2019, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kegiatan setiap bidang perlu direview dan disesuaikan tupoksi sehingga tidak terjadi tumpang tindih penanganan program dan kegiatan.
2. Penunjukan personil/pegawai pada setiap kegiatan perlu memperhatikan tingkat kompetensi, dedikasi, tanggungjawab terhadap pelaksanaan setiap program dan kegiatan.
3. Koordinasi perlu dilakukan lebih intensif antara seluruh komponen pelaksanaan program dan kegiatan.
4. Dukungan sarana prasarana, anggaran dan peningkatan kompetensi melalui bimbingan teknis sangat perlu direncanakan dan direalisasikan.
5. Program-program yang telah berjalan agar ditingkatkan dan dipelihara.